





Berakhlak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangga
Tahun 2023

Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka



Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.





KATA PEN	GANTAR	i
DAFTAR IS		lv
DAFTAR T	ABEL	V
DAFTAR G	AMBAR	vi
BAB I. PEN	NDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
В.	Tugas, Fungsi dan SumberDaya Manusia	2
	1. Tugas dan Fungsi	2
	2. Sumber Daya Manusia	6
	3. Sarana dan Prasarana	9
C.	Isu Strategis	12
D .	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangakat Daerah	19
/ €.	Sistematika Laporan	24
BAB II. PE	RENCANAAN KINERJA	26
A .	Perencanaan Kinerja	28
×	1. Tujuan dan Sasaran	28
	Strategi dan Arah Kebijakan	30
В.	Indikator Kinerja Utama	35
C.	Perjanjian Kinerja	35
D .	Standar Penilaian Kinerja	39
BAB III. AK	UNTABILITAS KINERJA	40
\ A	Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	40
	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	40
	2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023	45
	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka	52
	menengah pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	
	4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level	52
	nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	
	5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/	56
	Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	
	6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya)	70
	7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan	71
	pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	
B.	Realisasi Anggaran	85
BAB IV. PE		93





Tabel 1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat	6
Tabel 1.2	2 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara BerdasarkanPendidikan	8
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Badan Keuangan dan Aset Daerah	9
Tabel 2.1	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023	30
Tabel 2.2	2 Metode Analisis SWOT	31
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2018-2023	33
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah	35
Tabel 2.5	Sasaran dan Indikator Kinerja BKAD Tahun 2023	36
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	41
Tabel 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja	41
Tabel 3.3	Data Tanah Pemerintah Kota Malang per Sub Objek Barang	48
Tabel 3.4	Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang yang Bersertifikat sampai dengan	49
	Tahun 2023	
Tabel 3.5	Rekap Sertifikasi Tanah Pemkot Malang Tahun 2023	49
Tabel 3.6	Progres Proses Sertifikasi Tanah Pemkot Malang Tahun 2019 s/d 2023	50
Tabel 3.7	Rekapitulasi Lahan Aset Tanah Ijin Pemakaian sesuai dengan peruntukannya	50
	s/d Tahun 2023	
Tabel 3.8	Rekapitulasi Lahan Aset Tanah Ijin Pemakaian berdasarkan per Kecamatan s/d Tahun 2023	51
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	52
Tabel 3.1	Daftar Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Peraih WTP	53
Tabel 3.1	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)	70
Tabel 3.1	I2 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022	71
Tabel 3.1	Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan	72
Tabel 3.1	14 Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022	85
Tabel 3.1	Perbandingan Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang	89
	Tahun 2023 dengan Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022	
Tabel 3.1	Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota	90
	Malang Per Program Tahun Anggaran 2023	
Tabel 3.1	17 Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah	92
	Tahun 2023 dengan Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022	



Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang	5
Gambar 1.2	Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Pangkat	6
Gambar 1.3	Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar 1.4	Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Gambar 1.5	Isu Strategis BKAD	15
Gambar 2.1	Komponen Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	27
Gambar 2.2.	Dokumen Dalam SAKIP	27
Gambar 2.3	Sinkronisasi Antar Dokumen	27
Gambar 2.4	Cascading Kinerja BKAD selaras dengan RPJMD Kota Malang	39
Gambar 3.1	Nilai Komponen SAKIP BKAD 2022	42
Gambar 3.2	Data Tanah Pemerintah Kota Malang per Sub Objek Barang	48
Gambar 3.3	Daftar Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Peraih WTP	54
Gambar 3.4	Perbandingan Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota	89
	Malang Tahun 2023 dengan Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021 dan	
	Tahun 2022	
Gambar 3.5	Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Keuangan dan Aset	92
	Daerah Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023	
Gambar 3.6	Persentase Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset DaerahTahun	92
	2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023	



Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi tujuannya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari " berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan" menjadi " berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai".

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon III setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan



evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota Malang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 merupakan perwujudan kewajiban Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diamanatkan Walikota dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode tahun 2023. Menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 serta tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan perubahannya. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Tugas, Fungsi Dan Sumberdaya

1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang:



Tugas: melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pengelolaan BMD yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan BMD;
- b. penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
- c. fasilitasi penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya;
- d. penyusunan rancangan APBD beserta perubahannya;
- e. pelaksanaan fungsi BUD;
- f. penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang yang dalam kewenangannya BKAD;
- g. pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- i. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang;
- j. pelaksanaan fungsi pengelola investasi sesuai Kewenangan dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan;
- k. pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- pemanfaatan dan penatausahaan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- m. pengoordinasian penyelesaian sengketa pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dalam penguasaan pengguna barang;
- n. pelayanan pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;
- o. pemungutan retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya;
- p. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- q. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan pengelolaan BMD; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang keuangan dan pengelolaan BMD yang dalam kewenangannya.





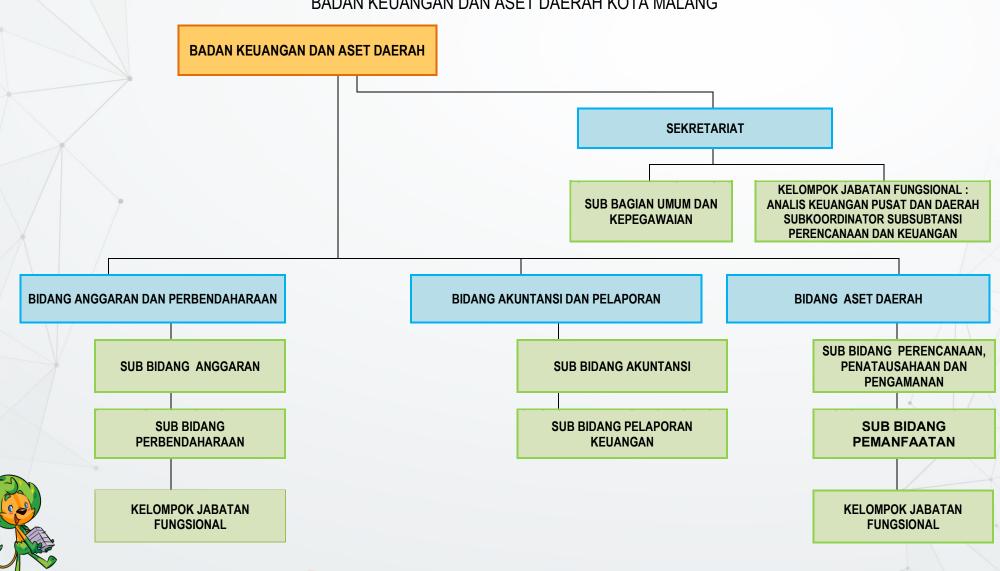
Mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB RI nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional serta surat Menteri Dalam Negeri RI tanggal 26 Maret 2021 nomor : 130/1970/OTDA tentang Penyerdehanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi atas regulasi tersebut, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang tanggal 31 Desember 2021 Nomor: 821.2/183/35.73.502/2021 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3/SE/II/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pejabat Fungsional, Pemerintah Kota Malang melakukan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional pada BKAD sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; untuk jabatan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan menjadi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Subtansi Perencanaan dan Keuangan; yang melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian tertentu, sehingga struktur organisasi perangkat Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Subtansi Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Anggaran;
 - 2) Sub bidang Perbendaharaan.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Akuntansi;
 - Sub bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- e. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pengamanan
 - 2) Sub bidang Pemanfaatan.

untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi BKAD digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG









Sumber Daya Manusia

Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh jumlah pegawai, dengan jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berjumlah 46 (empat puluh enam) orang.

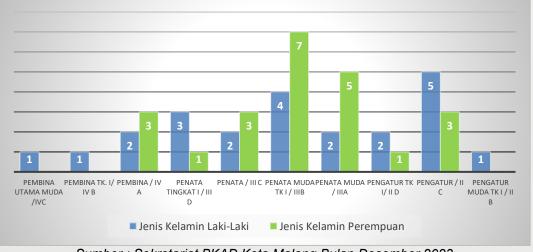
Dalam rangka menjalankan visi dan misinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang terdiri atas PNS (Gol II s/d IV) sebagaimana tabel berikut :

> Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat

	No.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat				
			Jenis K	Jumlah		
		Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	(org)	
	1.	Pembina Utama Muda /IVc	1		1	
	2.	Pembina Tk. I/ IV b	1		1	
	3.	Pembina / IV a	2	3	5	
	4.	Penata Tingkat I / III d	3	1	4	
	5.	Penata / III c	2	3	5	
	6.	Penata Muda Tk I / IIIb	4	7	11	
	7.	Penata Muda / Illa	2	5	7	
	8.	Pengatur Tk I/ II d	2	1	3	
	9.	Pengatur / II c	5	3	8	
	10.	Pengatur Muda Tk I / II b	1		1	
		JUMLAH	23	23	46	

Sumber: Sekretariat BKAD Kota Malang bulan Desember 2023

Gambar 1.2 Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Pangkat





Sumber: Sekretariat BKAD Kota Malang Bulan Desember 2023

Tahun 2023

Tabel 1.2

Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin				
No.	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	(org)	
1.	Kepala Badan	1		1	
2.	Sekretariat	5	4	9	
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	8	8	16	
4.	Bidang akuntansi dan Pelaporan	2	2	4	
5.	Bidang Aset Daerah	7	9	16	
	JUMLAH	23	23	46	

Sumber : Sekretariat BKAD Kota Malang bulan Desember 2023

Gambar 1.3 Jumlah ASN pada BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Sekretariat BKAD Kota Malang Bulan Desember 2023

Dalam rangka menunjang kompetensi dalam pelaksanaan tugas, Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang didukung oleh Aparatur Sipil Negara dengan latar belakang pendidikan yang terdiri atas :



Tabel 1.3

Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan

	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan						
No.	Pegawai		Pendidikan				
	Peyawai	S2	S1	D-III	SMA	SMP	Jumlah
1.	Kepala Badan	1					1
2.	Sekretariat	2	4		2	1	9
3.	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	1	4	6	5		16
4.	Bidang akuntansi dan Pelaporan	3	1				4
5.	Bidang Aset Daerah	2	11	2	1		16
	JUMLAH	9	20	8	8	1	46

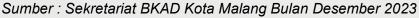
Sumber: Sekretariat BKAD Kota Malang bulan Desember 2023

Gambaran umum komposisi sumberdaya aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan latar belakang pendidikan dapat digambarkan dibawah ini :

Gambar 1.4

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada BKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan







3 Sarana dan Prasarana

Secara umum gambaran sarana dan prasarana kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan ruangan masing-masing bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, hal ini dapat terlihat sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.4 Sarana Prasarana Badan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Barang	Jumlah
1	Mobil Workshop	5
2	Station Wagon	2
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1
4	Pick Up	1
5	Sepeda Motor	33
6	Global Positioning System	2
7	Scanner (Universal Tester)	4
8	Penggaris Skala Triangular	8
9	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	2
10	Mesin Hitung Listrik	1
11	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2
12	Mesin Penghitung Uang	1
13	Mesin Fotocopy Folio	1
14	Lemari Besi/Metal	37
15	Lemari Kayu	3
16	Rak Besi	64
17	Rak Kayu	3
18	Filing Cabinet Besi	12
19	Brandkas	8
20	Tempat Menyimpan Gambar	4
21	Folding Container Box	1
22	Lemari Sorok	1
23	Lemari Kaca	7
24	Mesin Absensi	5
25	Headmachine Besar	1
26	LCD Projector/Infocus	3
27	Meja Kerja Kayu	12
28	Kursi Besi/Metal	16
29	Kursi Kayu	3
30	Meja Rapat	26
31	Meja 1/2 Biro	75



No.	Barang	Jumlah
32	Kursi Rapat	50
33	Kursi Putar	109
34	Bangku Tunggu	1
35	Kursi Lipat	35
36	Meja Komputer	1
37	Sofa	8
38	Lemari Es	2
39	A.C. Window	14
40	A.C. Split	1
41	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	33
42	Kipas Angin	6
43	Televisi	13
44	Loudspeaker	1
45	Sound System	3
46	Wireless	1
47	Microphone	1
48	Unit Power Supply	3
49	Camera Video	2
50	Camera film	3
51	Tangga Aluminium	2
52	Dispenser	6
53	Handy Cam	4
54	Alat Pemadam/Portable	1
55	Hidran Kebakaran	1
56	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
58	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16
63	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10
64	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
65	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	2
66	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	29
67	Microphone Connector Box	1
68	Uninterruptible Power Supply (UPS)	46
69	Video Monitor	1



No.	Barang	Jumlah
70	Camera Wall Box	1
71	Film Projector	1
72	Camera Film	1
73	Camera Digital	7
74	Video Conference	2
75	Mesin Stahd	2
76	Mesin Barcode	4
77	Pesawat Telephone	4
78	Telephone Mobile	6
79	Handy Talky (HT)	8
80	Facsimile	3
81	Camero Photo Micrograph	1
82	Personal Computer	10
83	Serial Scanner/Printer	1
84	Scanner (Assembly/counting System)	5
85	Uninterupted Power Supply (UPS)	20
86	GPS	3
87	Distometer	2
88	Mainframe (Komputer Jaringan)	1
89	Mini Komputer	30
90	P.C Unit	51
91	Lap Top	46
92	Note Book	51
93	Hard Disk	39
94	CPU (Peralatan Personal Komputer)	11
95	Monitor	3
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	148
97	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	17
98	External	1
99	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1
100	External/ Portable Hardisk	62
101	Server	16
102	Router	8
103	Hub	9
104	Modem	17
105	Kabel UTP	3
106	Mounting Kamera	1
107	GPS Survey	8



Sumber: Sekretariat BKAD Kota Malang, Desember 2023

C Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui:

- Metode forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan dihadiri oleh para stakeholder; dan/atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang
- 2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini
- 3. Terdapatnya perubahan regulasi, baik terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 4. Isu-isu nasional terkait sasaran reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan yaitu :
 - a. Mental aparatur dan manajemen perubahan
 - b. Pengawasan
 - c. Akuntabilitas
 - d. Kelembagaan
 - e. Tata Laksana
 - f. SDM ASN
 - g. Peraturan Perundang-undangan
 - h. Pelayanan Publik
- 5. Fondasi Baru bagi Aparatur Sipil Negara bahwa ASN yang bertugas harus mempunyai core values yang sama/Core values ASN 'BERAKHLAK' dengan Employer Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" sesuai surat edaran Menteri PAN & RB nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Core values bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesioanal memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam melayani masyarakat yaitu:



- a. Berorientasi Pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat
- b. Akuntabel, bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan
- c. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- d. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan
- e. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa
- f. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan
- g. Kolaboratif, membangun Kerjasama yang sinergis.

Isu Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan Lembaga membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dengan mengembangkan system informasi manajemen yang terintegrasi bidang keuangan dan asset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan didukung kelembagaan yang tepat fungsi, efektif, akuntabel dan transparan, yang dapat dijelaskan sesuai lingkup:

Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Ditetapkannya SIPD-RI sebagai Aplikasi Umum bagi Pemerintah Daerah;
- Penerapan SIPD RI sebagai generasi baru dari transformasi SIPD sebelumnya yang diawali dengan modul Perencanaan dan Pengganggaran untuk APBD Tahun 2024 dilanjutkan modul penatausahaan, pertanggungjawaban sampai pelaporan per tanggal 1 Januari 2024;
- Audit eksternal yang dilakukan Instansi vertical;
- Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang mendorong Pemerintah Daerah melakukan perubahan dan/atau penyesuaian.

Lingkup Pengelolaan Aset Daerah:

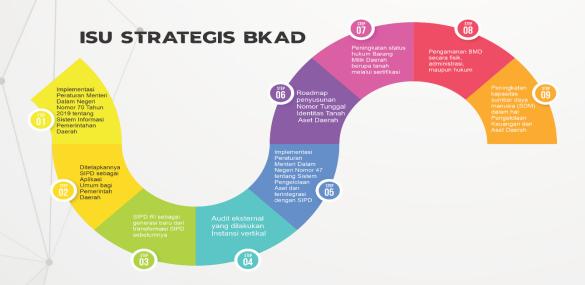
> Sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan keuangan daerah terus dikembangkan sesuai dengan



- perubahan regulasi dan tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik (e-BMD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD;
- Tersusunnya roadmap dan mekanisme yang jelas dan terukur untuk konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan Nomor Tunggal/SIN (Single Identification Number), Identitas aset tanah pada semua database dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah yang lebih akurat serta dalam rangka pencapaian Data Tunggal atas 4 (empat) database yang berbeda yaitu:
 - 1) Data base tanah pada Neraca Pemerintah Kota Malang;
 - 2) Database Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT);
 - 3) Database Retribusi Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
 - 4) Database hasil Inventarisasi Tanah Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - Peningkatan status hukum Barang Milik Daerah berupa tanah melalui sertifikasi. Persentase tanah aset daerah yang sudah bersertifikat masih sangat kecil. Kondisi tersebut terjadi kurang lebih masih banyak tanah dan bangunan yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang tetapi tidak didukung/belum didukung data yang otentik, sehingga diperlukan penelusuran dan identifikasi aset, disertai penetapan alas hak-nya sebelum melakukan pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/status hukum asetnya. Tahun 2023 dari 1.587 bidang yang diajukan/pendaftaran sebanyak 195 yang terbit sertifikat
- Hasil inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan mengidentifikasi terjadinya permasalahan-permasalahan di lapangan, sehingga perlu dilakukan fasilitasi/ rapat pembahasan permohonan/permasalahan aset daerah, hingga upaya /eksekusi melibatkan Satpol PP, Instansi/Pihak terkait dan APH



- Penatausahaan tanah aset daerah belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga di lapangan terdapat tanah aset daerah yang berubah kepemilikan oleh perorangan/badan hukum. Dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah membentuk Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah yang juga melibatkan Instansi terkait, Kantor Pertanahan dan APH
- Pengamanan asset daerah baik secara fisik, administrasi, maupun hukum. Penyimpanan surat-surat berharga (Sertifikat Tanah Aset Daerah, Dolkumen IP dan BPKB) secara digital, pemasangan papan-papan pengumuman/papan bicara kepemilikan tanah aset daerah dan sertifikasi tanah aset daerah..



Penetapan isu strategis diatas didasarkan pada pemetaan permasalahan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

- Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SK-PKD) selaku PPKD dalam hal ini Kepala BKAD Kota Malang, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah ;
 - b. Menyusun Rancangan Perda tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ; dan



 d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Kebijakan KUA/PPAS dan KUA/PPAS Perubahan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta belanja daerah Kota Malang diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain:

- 1. Pendidikan, adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan.
- 2. Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih.
- 3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenaga-kerjaan.
- 4. Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani, meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan pangan.
- 5. Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha



dan menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

- 6. Lingkungan Hidup, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- 7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, diarahkan untuk mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik.
- 8. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 9. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender, diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan Gender, terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.
- 10. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.



Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, meningkatkan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Isu-isu Strategis Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menetapkan 8 (delapan) Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Stunting
- 2) Kemiskinan
- 3) Birokrasi Yang Responsive dan Adaptif
- 4) Daya Saing SDM
- 5) Perlindungan Sosial dan Daya Beli
- 6) Tata Kota dan Branding
- 7) Kemudahan Berinvestasi
- 8) Pengendalian Inflasi

Dalam mendukung kinerja Tahun I (pertama) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu 2 (dua) strategi/prioritas sebagai Utama yaitu Birokrasi Yang Responsive dan Adaptif dan Daya Saing SDM. Namun Badan Keuangan dan Aset Daerah mengampu pula 4 (empat) strategi/prioritas daerah lainnya yaitu (1) Stunting (2) Kemiskinan (3) Perlindungan Sosial dan Daya Beli, dan (4) Pengendalian Inflasi, yang didukung dari pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) bilamana dalam keadaan darurat/mendesak dan tidak/belum direncanakan oleh Perangkat Daerah pengampu.

Selain pemilihan dan penetapan isu strategis diatas, terbitnya regulasi oleh Pemerintah Pusat, mendorong daerah untuk melakukan penyesuaian peraturan yaitu dengan menyusun Peraturan Walikota Malang yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain diterbitkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemrintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



Faktor Penghambat dan Pendorong

Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

- 1. Faktor penghambat antara lain:
 - a. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan aset daerah dengan SIPD menimbulkan permasalahan tersendiri pada akuntabiltas penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan/atau Pemerintah Daerah
 - b. Sumberdaya Manusia pengelola BMD kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah
 - c. Pengamanan terhadap aset daerah baik secara fisik, administrasi dan hukum belum maksimal
 - d. Banyaknya aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah
 - e. Kompleksitas konflik atau permasalahan atas aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- 2. Beberapa faktor pendorongnya adalah:
 - a. Profesionalisme pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah yang didukung dengan aplikasi Sistem Informasi Yang Terintegrasi, setelah Pemerintah menetapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi umum pada Pemerintah Daerah.
 - b. Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah.
 - c. Sinergi/Kerjasama dengan Instansi vertikal dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka inventarisasi dan/atau fasilitasi penanganan konflik pertanahan/bangunan.

Memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendorong di atas, maka tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1) Pelayanan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah saat ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis



Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2020-2023 (sasaran 2: Prioritas yang harus terus dipelihara (a) Mempertahankan opini WTP dari BPK). Prestasi Kota Malang dalam mempertahankan Opini WTP ke 12 (duabelas) kalinya secara berturut-turut, menggambarkan pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilaksanakan secara professional, akuntabel.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria:

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi/ Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun regulasi penganggaran, penatausahaan dan pertanggyngjawaban/pelaporan pengelolaan keuangan daerah antara lain:

- 1) Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Dan/Atau Alat Berat;



- Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
- 4) Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
- 5) Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (BTT);
- Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem Akuntansi dan Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Akuntansi sebagai pengganti PeraturanWalikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Malang secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi SAP Berbasis Akrual.

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain :

- Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- 3. Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4. Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
- 2) Pelayanan Aset Daerah





Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasaan serta pengendalian. Pengelolaan aset daerah merujuk kepada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Beberapa dapat diketengahkan terkait pelayanan pengelolaan aset daerah sebagai berikut:

- a. Kompleksitas permasalahan-permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah melatarbelakangi diterbitkannya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah yang memuat bagaimana mekanisme pencatatan pemanfaatan BMD dan penyajian Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu. Hasil laporan dalam penatausahaan BMD digunakan sebagai bahan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Output yang sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah adalah penatausahaan BMD melalui aplikasi e-BMD dalam satu system:
 - a. Persediaan (penerimaan, penyaluran persediaan)
 - b. Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan irigasi, asset tetap lainnya, KDP)
 - c. Asset lainnya (Kemitraan pihak ketiga, ATB, asset lain-lain)
 - d. Akumulasi penyusutan/amortisasi,

sistem aplikasi e-BMD dengan output yang dihasilkan sudah mencerminkan seluruh format laporan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 47 Tahun 2021.

b. Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap neraca daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca daerah masih merupakan nilai histories/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah. Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan



- kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya.
- Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimilik/dikelola/dikuasai pemerintah daerah yang mempunyai nilai ekonomis menjadi perhatian serius, sebagai perwujudan atas pelayanan publik (public service), pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMD) dan Perencanaan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah (RKPBMD) setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran; pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.
- d. Terhadap dokumen benda-benda berharga dan aset daerah yang diinventarisasi, disimpan melalui sistem penataan arsip. Sejak tahun 2013 telah dilakukan update dan pengembangan data SIGMA (Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset), dimana dalam sistem aplikasi ini data/obyek tersimpan berupa data tekstual maupun spacial yang dilengkapai titik-titik ordinat pada masing-masing obyek dan dapat diakses menggunakan perangkat berbasis Android. Penatausahaan pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan atau bangunan tersimpan dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT), dimana tanah aset daerah terarsipkan per obyek dengan data tersaji secara tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta).
- e. Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 5 (lima) Peraturan Walikota sebagai pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :



- Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
- 2) Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 3) Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemimdahtanganan Barang Milik Daerah
- 4) Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2021anperwal tentang Tata Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 5) Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2021 Ranperwal tentang Tata Cara Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah

Sistematika Laporan

Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam dokumen LKjIP Tahun 2023 ini diuraikan tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan perubahannya, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun Pemerintah Kota Malang di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKjIP ini tergambar dalam sistematik laporan yang tersusun sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LKjIP dan juga gambaran umum struktur organisasi, isu-isu strategis/permasalahan utama yang sedang dihadapi di lingkup organisasi serta sistematika penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Bab ini menguraikan muatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 dan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bab ini menguraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- 4 Mrmbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- 5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam system akuntabiltas kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia. Pengaturan terhadap pelaksanaan SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variable, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal sebagai fakta obyektif unit kerja mengimplementasikan SAKIP dan dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Berikut gambar 2.1. adalah komponen-komponen manajemen kinerja implementasi SAKIP.



Gambar 2.1. Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

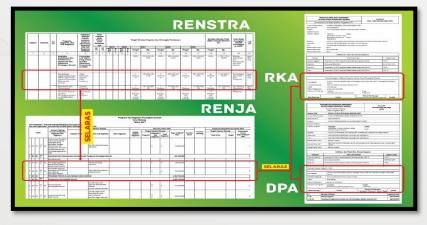


Berikut adalah dokumen-dokumen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dalam gambar 2.2

Gambar 2.2. Dokumen dalam SAKIP



Gambar 2.3 Sinkronisasi Antar Dokumen Perencanaan





A Perencanaan Kinerja

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2023 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan misi Kota Malang, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada misi 4 (empat) RPJMD, yaitu "Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel".

Maka tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Misi 4 : Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah

Yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Tujuan : Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah

Yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif

1 Tujuan dan Sasaran

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Kota Malang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumberdaya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka



menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

a. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan adalah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam satu periode tahun 2018 – 2023. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah ini menggambarkan fungsi pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berikut ini tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang:

Tujuan : Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

b. Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2018 – 2023. Berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, maka sasaran yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

dan Aset Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Berikut pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini



Tabel 2.1

Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra

Tahun 2018-2023

		Indikator	Kondisi	TARGET	KINERJA :	SASARAN F	PADA TAH	IUN KE
Tujuan	Sasaran	Tujuan/Sasaran	Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023
Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Persentase laporan keuangan SKPD berkualitas mendukung Opini BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP	77.76	84.4	84.5	84.8	84,9	85

Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan dapat menggunakan analisis SWOT yang merupakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi baik dari internal dan/atau eksternal organisasi.



Tabel 2.2 METODE ANALIS SWOT

INTERNAL

EKSTERNAL

KESEMPATAN/Opportunitiess

- 1. Trend peraturan dan kebijakan keuangan cukup progresif
- 2. Implementasi Permendagri Nomor 70/2019 tentang SIPD
- 3. Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum bagi PemDa
- 4. Penerapan SIPD RI sebegai generasi baru transformasi SIPD
- 5. Sinergitas instansi vertikal dan APH dalam pengelolaan keuangan dan aset
- 6. Adanya pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset
- 7. Adanya pihak ketiga yang membantu penilaian **BMD** untuk sewa/penghapusan
- 8. Telah dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait
- 9. Audit eksternal yang dilakukan Instansi
- 10. Peningkatan keperrcayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah

TANTANGAN/Threats

- Peraturan pengelolaan mendasar sering berubah
- Audit internal belum dapat seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuan-temuan audit eksternal
- 3. Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan aset daerah dapat menimbulkan konsekuensi hukum
- 4. Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik termasuk informasi
- Penggunaan aset pemda tanpa ijin pengambil alihan aset pemda oleh pihak lain

KEKUATAN/Strength

- Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah diatur cukup baik
- 2. Memiliki kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku
- Memiliki kewenangan untuk mengelola barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- Tersedianya system aplikasi pengelolaan keuangan daerah (SIPD ke SIPD -RI)
- Sarana perndukung sistem manajemen aset yang memadai
- Terbangunnya aplikasi pengelolaan BMD terintrgrasi dengan SIPD sesuai Permendagri Nomor 47/2021
- Telah tersedianya peraturan walikota juknis pengelolaan BMD

KEKUATAN x KESEMPATAN

- 1. Pengelolaan keuangan dan aset daerag diatur cukup baik, sehingga mudah untuk mengikuti perubahan regulasi/ peraturan dan kebijakan keuangan
- 2. Peningkatan SDM Pengelola Keuangan SKPD
- 3. Peningkatani kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola keuangan
- 4. Peningkatan kerjasana dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola Barang Milik
- Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan barang milik daerah
- 6. MoU dengan instansi vertikal dalam rangka percepatan sertifikasi
- Peningkatan kerjasama dengan APH dalam inventarisasi dan/atau penanganan konflik pertanahan/bangunan
- Pencapaian opini BPK atas L/K WTP keduabelas kalinya sejak tahun 2011
- 9. Publikasi pengelolaan keuangan daerah secara transparan

KEKUATAN x TANTANGAN

- Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan dapat peraturan keuangan mendasar yang sering
- 2. Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu SKPD agar terhindar dari temuan audit eksternal
- Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan
- 4. Perbaikan sistem pengelolaan aset daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik.
- Kewenangan mengelola aset daerah untuk menanggulangi penggunaan aset /pengalihan status yang tidak sesuai dengan ketentuan

KELEMAHAN/Weakness

- 1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh
- 2. Pelaporan keuangan dari SKPD masih belum optimal
- 3. Rekonsiliasi internal atas laporan keuangan dan BMD SKPD belum optimal
- 4. SDM Pengelola Aset Daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah
- 5. Belum memadainya pengamanan Barang Milik Daerah baik yang bersifat fisik, adminstrasi maupoun hukum.
- 6. Banyaknya aset tanah daerah yang belum di dukung dengan dokumen legal formal yang sah

KELEMAHAN x KESEMPATAN

- 1. Optimalisasi/peningkatan Pengelola Keuangaan dan Aset Daerag SKPD terhadap peraturan dan kebijakan keuangan dan aset daerah
- 2. Asistensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan masih harus dilakukan
- 3. Rekonsiliasi dan konsolidasi L/K SKPD dalam rangka penyusunan L/K Pemda membutuhkan waktu lama
- 4. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang kurang memahami
- 5. Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh pihak ke tiga
- 6. Optimalisasi pengamanan BMD bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang bersifat fisik dan

KELEMAHAN x TANTANGAN

- 1. Peraturan yang sering berubah mendorong untuk sering diadakan sosialisasi/bimbingan teknis sehingga akan meningkatkan pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan agar SKPD terhindar dari temuan audit eksternal.
- 3. Peningktan pemahaman regulasi aset daerah untuk memperkecil konsekuensi hukum
- 4. Peningkatan sistem integrasi aset untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang
- 5. Peningkatan pengamanan aset yang bersifat fisik, adiministrasi dan hukumi untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin/ pengalihan status tidak sesuai ketentuan







Adapun strategi adalah sebagai berikut (disesuaikan dengan Renstra):

- Meningkatkan pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan
- 2. Menjaga keselarasan perencanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pelaksanaannya
- Pengembangan Sistem Tata Kelola Keuangan Daerah dalam rangka mendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)
- 4. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah Single Identification Number (SIN) / Data Tunggal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan asset daerah.

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut (disesuaikan dengan Renstra) :

- 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
- 2. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur
- 4. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah
- Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi
- 6. Pemahaman regulasi/peraturan perundang-undangan lebih ditingkatkan
- 7. Integrasi Sistem Informasi Pengelolaam Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah
- 8. Penyajian Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Barang dan Modal SKPD sebagai dasar pencairan anggaran melalui sistem aplikasi yang ter-online dengan SKPD



- 9. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola Barang Milik Daerah
- 10. Merumuskan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah
- 11. Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi
- 12. Sinkronisasi kesesuaian data bukti asli kepemilikan dengan data Neraca
- 13. Menyusun roadmap dan mekanisme yang jelas dan terukur untuk konsolidasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan nomor tunggal identitas aset tanah pada semua database, dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Kota Malang yang lerbih akurat serta dalam rangka pencapaian Single Data atas 4(empat) data base tanah IP yang berbeda yaitu:
 - 1) Database tanah pada Neraca Pemerintah Kota Malang
 - 2) Database Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah
 - 3) Database Retribusi IP
 - 4) Database hasil Inventarisasi Tanah IP
- 14. Merumuskan kebijakan peningkatan PAD dari pemanfaatan tanah aset
- 15. Melakukan konsolidasi/inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah

Berikut pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2018-2023

			, and the second	
Tercapaiany Optimalisas Pengelolaar Keuangan c Aset Daeral Transparan Akuntabel	i n dan h Yang	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Strategi 1: Meningkatkan pelaksanaan pelayanan tugas dan fungsi yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan	Arah Kebijakan 1: Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah. Arah Kebijakan 2: Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Arah Kebijakan 3: Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur



Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Strategi 2: Menjaga keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaannya	Arah Kebijakan 4: Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah Arah Kebijakan 5: Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi Arah Kebijakan 6: Pemahaman regulasi/peraturan perundang-undangan lebih ditingkatkan
		Strategi 3: Pengembangan Sistem Tata Kelola Keuangan Daerah	Arah Kebijakan 7: Integrasi Sistem Informasi Pengelolaam Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Arah Kebijakan 8: Penyajian Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Barang dan Modal SKPD sebagai dasar pencairan anggaran melalui sistem aplikasi yang ter-online dengan SKPD
		Strategi 4: Meningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur di bidang pengelolaan aset daerah	Arah Kebijakan 9: Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola Barang Milik Daerah Arah Kebijakan 10: Merumuskan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah
		Strategi 5: Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah/ Single Data/Basis Data	Arah Kebijakan 11: Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi Arah Kebijakan 12: Sinkronisasi kesesuaian data bukti asli kepemilikan dengan data Neraca Arah Kebijakan 13: Merumuskan kebijakan peningkatan PAD dari pemanfaatan tanah aset daerah Arah Kebijakan 14: Melakukan konsolidasi/inventarisasi dan penatausahaan barang milik daerah





B Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/453/35.73.112/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/234/35.73.112/2019 Tentang Perubahan Atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

Adapun IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama BKAD Tahun 2018 - 2023

		Indikator Kinerja Otama BKAD Tahun 2018 - 2023									
	No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi		Та	rget Tah	un			
	110		Kinerja Utama	Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	Tercapainya	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Optimalisasi	laporan								
		Pengelolaan	keuangan								
		Keuangan dan	SKPD								
		Aset Daerah	berkualitas								
\		Yang	mendukung								
\		Transparan dan	Opini BPK								
1		Akuntabel									
	1	Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		kualitas	laporan								
		Laporan	keuangan								
_		Keuangan	SKPD bebas								
		Pemerintah	salah saji								
		Daerah	material								
	2	Meningkatnya	Nilai SAKIP	77,76	84.4	84.5	84.8	84,9	85		
		Kinerja									
Y		Pelayanan									
/		Badan									
		Keuangan dan									
		Aset Daerah									

C Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan



tahunan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekat dan janji yang disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah yang bertujuan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur mendorong komitmen dalam meningkatkan kinerjanya serta sebagai alat pengendalian manajemen bagi organisasi. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran staregis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutam, indicator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut :

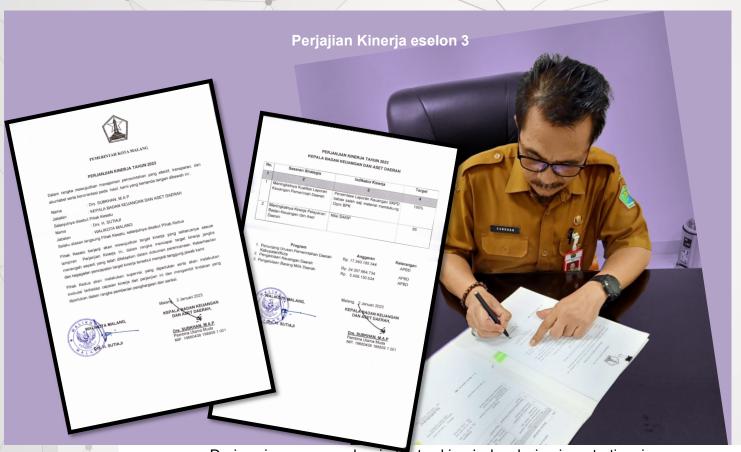
Tujuan : Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

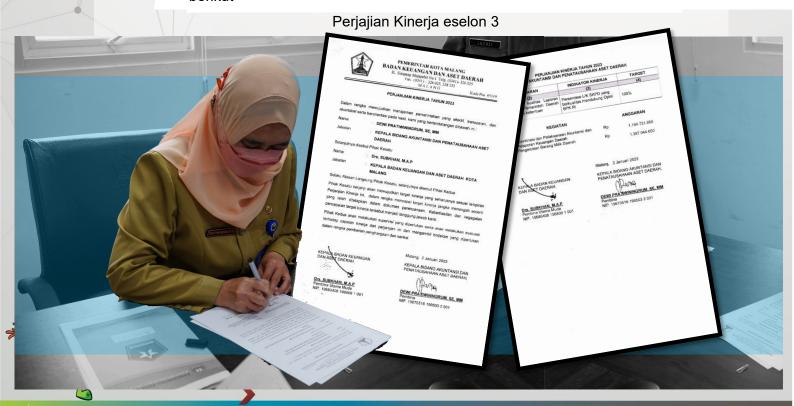
Tabel 2.5 Sasaran dan Indikator Kinerja BKAD Tahun 2023

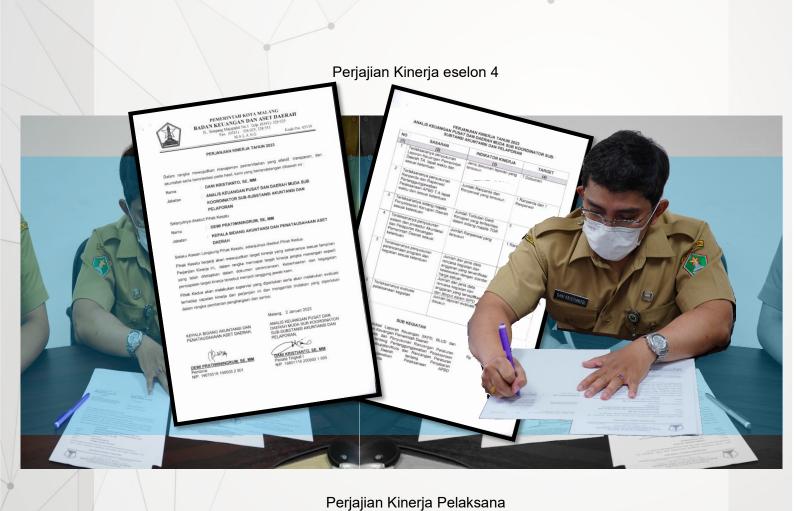
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	(Rp)
×	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Sakip	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16,339,870,110.00
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendukung Opini BPK	Persentase L/K SKPD yang berkualitas mendukung opini BPK RI	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	22,779,387,283.00
イン				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6,198,841,660.00

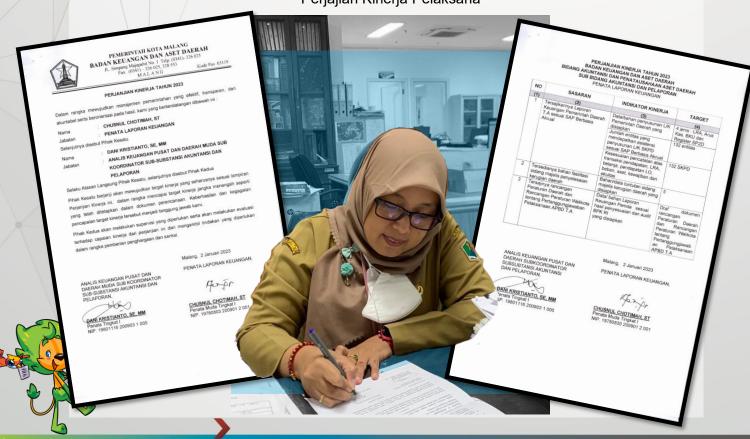




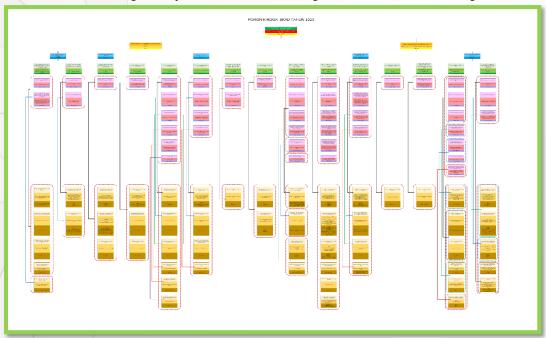
Dari uraian sasaran dan indikator kinerja level pimpinan tertinggi (eselon II) diturunkan menjadi perjanjian kinerja setiap pegawai sampai dengan Pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan/ cascading dari perjanjian kinerja atasannya sebagaimana dalam gambar berikut







Gambar 2.4
Cascading Kinerja BKAD selaras dengan RPJMD Kota Malang



Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
90 ≤ x < 110	Tercapai/ Berhasil
60 ≤ x < 90	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
x < 60	Tidak tercapai/ Tidak berhasil





Akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah 2018– 2023, yang telah dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 beserta perubahannya. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam rangka pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

A Capaian Kinerja BKAD

Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yaitu:

- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan ;
- Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini:



Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

/	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KET
/	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Sakip	Nilai 85	Nilai 90,45	106.41%	
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material	100%	100%	100%	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 103,27% pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 100%.

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 sampai tahun 2023

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

	SASARAN	INDIKATOR	Data	R	EALIS	ASI KIN	IERJA			CAP	AIAN KII	NERJA	
	STRATEGIS	KINERJA	Awal (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
S	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Sakip	Nilai 77,76	Nilai 85,80	Nilai 84,62	Nilai 88,99	Nilai 90,20	Niai 90.4 5	101, 66%	100,1 4%	104,9 %	106.24 %	106,41 %
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

Pengukuran kinerja dari tahun 2018 sampai 2023 untuk menunjukkan peningkatan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

 Sasaran strategis : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator kinerja 1 : Nilai Sakip

Evaluasi terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencaaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal dilakukan APIP atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menunjukkan kategori Peringkat A (Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel) dengan perolehan nilai 90,45.

Gambar 3.1



b) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja 2 : Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK, tercapai 100% dengan diperolehnya Opini WTP BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daaerah wajib menyusun dan menyajikan :



- a. Laporan Keuangan; dan
- b. Laporan Kinerja

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntablitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Walikota. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 temtamg Stamdar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun



2017, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Malang secara bertahap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi SAP Berbasis Akrual.

Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain :

- Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan
 Pemerintah Daerah;
- 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik;
- 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Sebagai implementasi atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri turunannya, maka berdampak pula pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Maka upaya Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual tahun 2023 antara lain:

- 1) Menyusun rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 2) Menyusun rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 3) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan; integrasi sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan/pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) versi 47 yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;



- 4) Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) modul Akuntansi dan Pelaporan;
- 5) Rekonsiliasi dan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Interim/Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- 6) Menyusun Berita Acara Rekonsiliasi Konsolidasi Barang Milik Daerah per triwulanan.



Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugasnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mempergunakan beberapa aplikasi penatausahaan keuangan dan aset daerah, antara lain:

- SIPD, sistem aplikasi berbasis website milik Kementrian Dalam Negeri, meliputi Perencaan Anggaran Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah.
- 2) SIPEX (Sistem Informasi Pelaporan Eksekutif), sistem berbasis android yang menyajikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing SKPD, masing-masing jenis/komponen pendapatan dan belanja. Pemangku kepentingan dapat secara realtime memantau perkembangan serapan anggaran di manapun dan kapanpun.
 - Daerah), sistem yang digunakan untuk melakukan manajemen aset barang milik daerah, baik yang bersifat Modal maupun Habis Pakai/Persediaan
 - SIGMA (Sistem Informasi Geografis Tanah Aset Daerah), Sistem aplikasi untuk menyimpan/mengarsip data/obyek berupa data tekstual maupun spasial yang dilengkapi dengan titik-titik ordinat pada masing-masing obyek
 - SIPIPT (Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah), Sistem aplikasi untuk menyimpan dan mengarsipkan data Ijin Pemakaian Tanah-Tanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

Selain diuraikan diatas, Pemerintah Daerah Kota Malang dalam rangka memberikan informasi dan/atau pelaporan capaian kinerjanya juga melalui laman Monitoring Centre For Prevention (MCP) sebagai



aksi pencegahan Korupsi terintegrasi dengan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), meliputi 8 (delapan) Area Intervensi yaitu:

- 1) BKAD; Perencanaan dan Penganggaran APBD; Standar Satuan Harga sebagai dasar penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa
- 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 4) Kapabilitas APIP
- 5) Manajemen ASN
- 6) Dana Desa
- 7) Optimalisasi Pendapatan Daerah
- 8) BKAD; Manajemen Aset Daerah; Laporan Capaian Tanah Aset Daerah yang bersertifikat; Laporan Aset Daerah yang berpotensi Peningkatan PAD; Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan telah disyahkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota sebagai dasar pelaksanaannya



Berikut adalah luas lahan tanah aset daerah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Malang disajikan pada tabel 3.3 berikut ini.

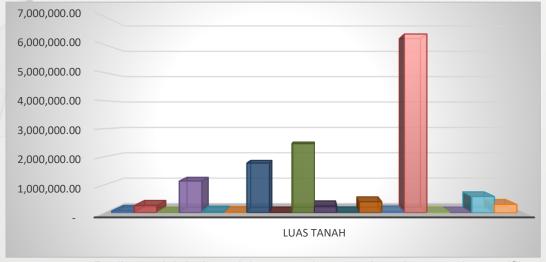
Tabel 3.3

Data Tanah Pemerintah Kota Malang per Sub Objek Barang

ı	No	Nama Kode Sub	Luas Tanah
	1	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	64,306
4	2	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	256,685
ı	3	Tanah Untuk Bangunan Industri	2,400
	4	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1,133,301
	5	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	38,881
	6	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	23,047
1	7	Tanah Kering	1,773,544
	8	Tanah Hutan	6,825
	9	Tanah Pertanian	2,466,721
	10	Tanah Lapangan Olah Raga	238,180
	11	Tanah Lapangan Parkir	11,665
	12	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	391,376
	13	Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam	44,992
	14	Tanah Untuk Jalan	6,380,884
	15	Tanah Untuk Bangunan Air	12,343
	16	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	1,580
\	17	Tanah Untuk Makam	581,426
1	18	Tanah Untuk Taman	295,545
		Total	13,723,701
		0 1 00	

Gambar 3.2

Data Tanah Pemerintah Kota Malang per Sub Objek Barang



Berikut adalah luas lahan tanah aset daerah yang bersertifikat disajikan pada tabel 3.3 berikut ini.



Tabel 3.4

Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang yang Bersertifikat s/d Tahun 2023

No.	Peruntukan		Juml	ah Bida	ng s/d t	ahun				Luas Tan	ah (m2)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian	304	328	369	369	383	390	1,317,509	1,396,676	1,528,482	1,528,482	1,569,806	1,582,619
2.	Pendidikan	197	222	228	228	237	239	625,571	575,301	605,222	605,222	614,857	625,253
3.	Taman	42	62	62	62	69	72	22,660	120,504	120,504	120,504	138,247	147,628
4.	Puskesmas	24	27	27	27	31	33	17,992	18,789	18,789	18,789	26,941	27,992
5.	Kantor	64	76	78	78	81	83	131,163	135,238	154,034	154,034	167,981	170,578
6.	Pasar	28	30	30	30	40	40	115,686	175,782	175,782	175,782	180,429	180,429
7.	Terminal	13	14	14	14	14	15	84,943	51,273	51,273	51,273	51,273	56,793
8.	Makam	22	22	23	23	25	27	93,237	93,237	192,955	192,955	220,464	227,777
9.	Fasilitas Umum	4	5	5	5	11	27	34.577	31,023	31,023	31,023	31,979	48,000
10.	Gedung	4	4	4	4	13	18	14.495	14,495	14,495	14,495	20,203	78,012
11.	Jalan	10	13	13	16	22	27	15.523	16,213	16,213	18,833	22,649	38,598
12.	Lapangan	17	22	22	22	38	38	191,911	202,673	202,673	202,673	242,101	242,101
13.	Rumah Dinas	5	6	6	6	6	6	9.528	6,435	6,435	6,435	6,435	6,435
14.	TPA/TPS	14	14	14	14	16	17	53.118	53.118	53.118	53.118	65,250	87,932
15.	Industri					59	61	480.461	119,731	122,123	138,152	82,955	83,728
16.	Tempat Tinggal (IP)					640	652					215,536	226,141
17.	Lain-lain	154	67	123	168	25	106	480.461	119,731	122,123	138,152	25,428	399,379
	JUMLAH	902	918	992	1308	1710	1767	3.208.374	3,010,488	3.293.121	3.352.681	3,682,534	3,800,430

Tabel 3.5
Rekap Sertifikasi Tanah Pemkot Malang Tahun 2023

ASET PEMDA 2023										
TOTAL	BERSERT	IFIKAT	BELUM BERSERTIFIKAT							
8,264	SERTIPIKAT	1,767	6,497							
	BIDANG	195	4,669							
	TOTAL BIDANG	3,595								

RINCIAN PROGRESS PERBULAN

BULAN		SERTIFIKAT TERBIT TAHUN 2023									
DULAN	SERIPIKAT	BIDANG	LUAS	NILAI (Rp)							
JANUARI	13	43	30,442	85,686,688,344.00							
FEBRUARI	-	-	-	-							
MARET	-	-	-	-							
APRIL	15	19	9,860	14,095,534,000							
MEI	1	18	1,754	1,810,128,000.00							
JUNI	6	44	4,708	7,457,391,640							
JULI	12	51	56,415	242,574,353,000							
AGUSTUS	13	13	42,896	138,204,791,000							
SEPTEMBER	-	-	-	-							
OKTOBER	-	-	-	-							
NOVEMBER	4	4	18,259	6,007,400,000							
DESEMBER	3	3	3,562	7,422,500,000							
TOTAL	67	195	167,896	503,258,785,984.00							



Tabel 3.6
Progres Proses Sertifikasi Tanah Pemkot Malang Tahun 2018 s/d 2023

ASET PEMDA 31 DES 2018										
TOTAL	BELUM BERSERTIFIKAT									
8,264	SERTIPIKAT	902	7,346							
	BIDANG	902								

TOTAL	TOTAL		
8,264	SERTIPIKAT	918	7,346
	BIDANG	918	

ASET PEMDA 31 DES 2020									
TOTAL BERSERTIFIKAT BELUM BER									
8,264	SERTIPIKAT	992	7,272						
	BIDANG	992							

ASET PEMDA 31 DES 2021									
TOTAL	TOTAL BERSERTIFIKAT								
8,264	SERTIPIKAT	1,308	6,956						
	BIDANG	1,308	6,956						

ASET PEMDA 2022									
TOTAL BERSERTIFIKAT BELUM BERSERTIFIK									
8,264	SERTIPIKAT	1,700	6,564						
	4,864								

ASET PEMDA 2023										
TOTAL	BERSERTIFIKAT BELUM BERSERTIFIKA									
8,264	SERTIPIKAT	1,767	6,497							
	BIDANG	195	4,669							
TO	OTAL BIDANG	3,595								

Rekapitulasi jumlah lahan aset tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Malang disajikan tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Lahan Aset Tanah Ijin Pemakaian sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya s/d Tahun 2023

PERUNTUKAN	JUMLAH BIDANG	TOTAL LUAS
Fasilitas Umum	15	4.301 m ²
Industri	472	401.004,5 m ²
Kegiatan Sosial	28	19.199 m²
Pemukiman/Rumah Tanggal	12.565	1.512.384,98 m²
Pendidikan	66	862.155 m ²
Perkantoran	55	49.863,1 m ²
SPBU/Pom Bensin	13	10.689 m²
Tanah Pertanian	2	35.021 m ²
Tempat Ibadah	21	393 m²
Usaha Toko/Kios	375	61.144,7 m ²
Peruntukan Lainnya	4	1.634 m²
JUMLAH	7.389	2.957.789,28 m²



Tabel 3.8

Rekapitulasi Lahan Aset Tanah Ijin Pemakaian berdasarkan per Kecamatan s/d Tahun 2023

KECAMATAN	JUMLAH BIDANG	TOTAL LUAS		
BLIMBING	1543	526584.29 m²		
KEDUNG KANDANG	289	111152.5 m²		
SUKUN	2811	543823.99 m²		
KLOJEN	2287	753764.82 m²		
LOWOKWARU	451	252877.5 m²		
JUMLAH	7.389	2.957.789,28 m²		



3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah
Rensta PD tahun 2018 - 2023

	No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Target Jangka INDIKATOR menengah		Realisasi Kinerja							
	STRATEGIS		KINERJA	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	1	2	3	4			5	6	7	8			
	1.	Tercapainya Optimalisasi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		Pengelolaan Keuangan	laporan keuangan										
/		dan Aset Daerah Yang	SKPD berkualitas										
/		Transparan dan	mendukung Opini										
		Akuntabel	ВРК										
ľ	2.	Meningkatnya Kinerja	Nilai Sakip	Nilai 85	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai			
		Pelayanan Badan			77,76	84,40	84,62	88,99	90,20	90,45			
		Pengelolaan Keuangan											
		dan Aset Daerah											
	3.	Meningkatnya kualitas	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
j		Laporan Keuangan	laporan keuangan										
		Pemerintah Daerah	SKPD bebas salah										
			saji material										



Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)



Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berhasil dengan Sangat Memuaskan, dengan diterimanya Opini BPK atas pemeriksaan L/K Pemda WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 12 (duabelas) kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan 2023.

Berikut adalam data capaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK mulai tahun 2008- 2022 di wilayah Kab/Kota se Provinsi Jawa Timur

Tabel 3.10

Daftar Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Peraih WTP

Tahun 2010- 2022

	No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015	Opini Tahun 2016	Opini Tahun 2017	Opini Tahun 2018	Opini Tahun 2019	Opini Tahun 2020	Opini Tahun 2021	Opini Tahun 2022	JUM LAH WTP
	1	Prov. Jawa Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	11							
}	2	Kab. Bangkalan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	9
	3	Kab. Banyuwangi	WDP	WDP	WTP	10										
	4	Kab. Blitar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	6						
	5	Kab. Bojonegoro	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	8								
	6	Kab. Bondowoso	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	10								
1	7	Kab. Gresik	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	7							
	8	Kab. Jember	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WDP	TMP	TW	WDP	WDP	3
	9	Kab. Jombang	WDP	WDP	WDP	WTP	9									
	10	Kab. Kediri	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	6						
	11	Kab. Lamongan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	6						
	12	Kab. Lumajang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	7
	13	Kab. Madiun	WDP	WDP	WDP	WTP	9									
	14	Kab. Magetan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	8								
	15	Kab. Malang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	8								
/	16	Kab. Mojokerto	WDP	TMP	WDP	TW	WTP	8								
	17	Kab. Nganjuk	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	9
	18	Kab. Ngawi	WDP	WDP	WDP	WTP	9									
	19	Kab. Pacitan	WTP	WTP	WDP	WTP	11									
	20	Kab. Pamekasan	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP	9								
× 5	21	Kab. Pasuruan	WDP	WDP	WDP	WTP	9									
	22	Kab. Ponorogo	WDP	WDP	WTP	10										
	23	Kab. Probolinggo	WDP	WDP	WDP	WTP	9									



Berakhlak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

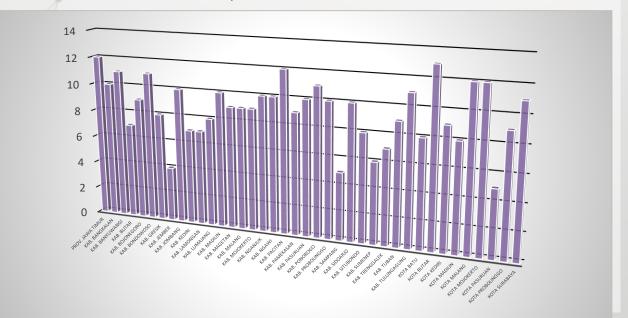
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif Laporan Bangga

Tahun 2023

	No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015	Opini Tahun 2016	Opini Tahun 2017	Opini Tahun 2018	Opini Tahun 2019	Opini Tahun 2020	Opini Tahun 2021	Opini Tahun 2022	JUM LAH WTP
	24	Kab. Sampang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	4							
	25	Kab. Sidoarjo	WDP	WDP	WDP	WTP	9									
	26	Kab. Situbondo	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	7						
	27	Kab. Sumenep	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	5						
	28	Kab. Trenggalek	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	6						
	29	Kab. Tuban	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	8							
	30	Kab. Tulungagung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	10
1	31	Kota Batu	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	7							
1	32	Kota Blitar	WTP	12												
	33	Kota Kediri	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	8								
	34	Kota Madiun	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	7
	35	Kota Malang	WDP	WTP	11											
	36	Kota Mojokerto	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	11								
/	37	Kota Pasuruan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	4
	38	Kota Probolinggo	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	8
	39	Kota Surabaya	WDP	WDP	WTP	10										

Gambar 3.3

Daftar Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Peraih WTP







Selain perbandingan perolehan WTP dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, capaian kinerja BKAD Kota Malang diapresiasi oleh



Menerima Penghargaan WTP ke 12 untuk Kota Malang Tahun 2023

Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia, dengan melakukan kunjungan kerja /studi tiru terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.



Berakhlak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangga Tahun 2023

Sinergitas/Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka percepatan penerapan SIPD secara rutin/berkala dilakukan melalui kegiatan koordinasi, konsultansi dan bimtek/Training of Trainer dengan menghadirkan Tim SIPD sebagai narasumber.



Konsultasi dan koordinasi Pemerintah Kota Malang dengan Bina Keuangan Daerah, Kemendagri RI



5

Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

dilakukan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut

Tujuan : Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel



Indikator : Persentase Laporan Keuangan SKPD berkualitas mendukung Opini BPK, tercapai 100% dengan diperolehnya Opini BPK WTP ke 12 (duabelas) kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011, sesuai target pada Rencana Strategis melalui dukungan pencapaian inerja sasaran strategis yang dicapai setiap tahunnya.

 Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (rata2 capaian indikator sekitar 100%) sesuai yang diperjanjikan.

Indikator 1: Nilai SAKIP

Evaluasi terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencaaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal dilakukan APIP atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 menunjukkan kategori Peringkat A (Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel) dengan perolehan nilai 90,45. Dengan rincian sbb:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	27,60
b. Pengukuran Klnerja	30%	27,00
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,35
d. Evaluasi Internal	25%	22,50
	100%	90,45

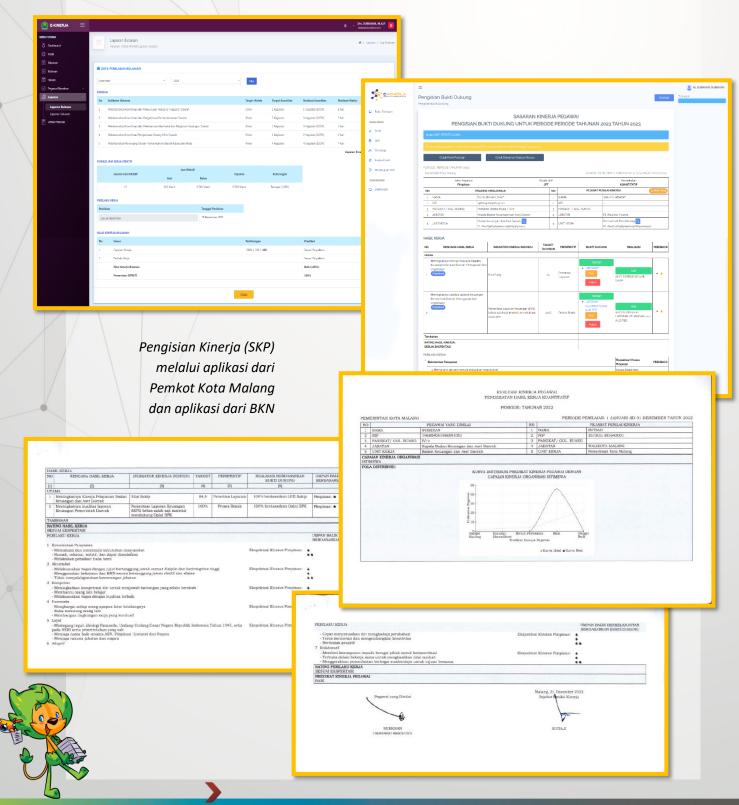
Sehingga capaian target nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar 90,45 tercapai 100%.

Namun dermikian terdapat beberapa catatan upaya perbaikan yang direkomendasikan agar sasaran organisasi tercapai maksimal antara lain :

- 1) Melakukan pengumpulam data kinerja yang sepenuhnya dapat diandalkan dan terdokumentasi.
- 2) Menyusun peraturan tentang pemberian penghargaan (reward) dan sanksi/hukuman (punishment) atas kinerja ASN mulai dari setingkat eselon IV ke atas dan kepada seluruh ASN, sehingga hasil Pengukuran Kinerja sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment kepada seluruh aparatur/ASN.



 Pengukuran kinerja dengan pemanfaatan IT yang terintegrasi yang telah dianggarkan pada tahun 2023 melalui e-Kinerja



4) Menindaklanjuti evaluasi internal pada masing-masing program untuk perbaikan program yang akan datang.





- 5) Menidaklanjuti evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata disertai dengan dukungan data yang valid dan sumber data yang kompeten dalam pencapaian target kinerja.
- 6) Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui kegiatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI bersama APIP



selaku APIP terkait hasil

pemeriksaan BPK



2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator : Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK (Berhasil) telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu 100% L/K SKPD yang berkualitas mendukung Opini BPK RI dengan pernyataan:

- 1) Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga secara kualitas persentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD Yang Mendukung Opini BPK RI dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Seluruh Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD) sebanyak 134 SKPD, yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan telah dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual.
- 3) Opini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yaitu standar yang mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari saji material. Suatu pemeriksaan meliputi:
 - a) bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan;
 - b) penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat Pemerintah Kota Malang;
 - c) penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan;
 - d) penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan; serta



- e) penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan.
- 4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan

Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria :

- (a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP);
- b) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;
- c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset).

Meski demikian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK - RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022, terdapat beberapa cacatan khususnya terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dilakukan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas manajemen aset oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur yaitu:

- a) Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Belum Mutakhir
- b) Pengadaan dan Pemnafaatan Kendaraan Operasional Kantor Tidak Memadai; PinjamPakai untuk Instansi Di Luar Pemerintah Kota Malang;
- c) Pengelolaan Aset Tanah Izin Pemakaian Tidak Tertib;
- d) Pengelolaan Aser Tetap Pemerintah Kota Malang Tidak Tertib Atas catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) diatas Badan Keuangan dan Aset Daerah telah:



- Menyusun regulasi pengelolaan keuangan dan kebijakan penganggaran daerah antara lain:
 - Peraturan Walikota Malang Nomor 25 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat
 - Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
 - 3) Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
 - 4) Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
 - 5) Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
 - 6) Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Malang;
 - 9) Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Malang
- Menyusun kebijakan Kepala Daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah setelah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :



- Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2021 tentang
 Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
- 2) Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata Cara Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- 3) Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemimdahtanganan Barang Milik Daerah
- 4) Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 5) Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2021 Ranperwal tentang Tata Cara Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah
- 6) Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
- 7) Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerjasama Penyedia Infrastruktur Atas Barang Milik Daerah
- 8) Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- 9) Rancangan Peraturan Walikota Malang Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bangun Guna Serah Atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah
- 3. Melakukan upaya-upaya dalam rangka penertiban pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain:
 - Melakukan validasi dan konsolidasi data aset tanah Ijin Pemakaian dalam aplikasi sistem manajemen aset daerah dengan data/pencatatan obyek IP pada Data Wajib Retribusi; selanjutnya dilakukan



rekonsiliasi atas hasil inventarisasi dan Neraca Pemerintah Kota Malang;







b. Pengawasan dan pengendalian atas tanah aset daerah Ijin Pemakaian sesuai peruntukan dan pemanfaatannya; dengan dilakukan peninjauan/cek lokasi yang menunjukkan perbedaan peruntukan antara permohonan dalam SK IP dengan kondisi di lapangan;





- c. Pemantauan Masa Berlaku Ijin Pemakaian sesuai peruntukan dan pemanfaatan yang diajukan Pemohon dengan melakukan verifikasi, pemantauan, cek lokasi dan/atau pemanggilan para pemegang IP
- e. Menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu Yang Dikuasai Pemerintah Kota Malang sebagai petunjuk teknis atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 1997 sudah tidak selaras dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga tanah aset daerah Ijin Pemakaian sebagai obyek pemanfaatan Barang Milik Daerah yang bentuknya dapat berupa sewa dengan besaran tarif yang mengacu pada harga pasar wajar
- f. Menyusun dan menetapkan kebijakan khusus tentang pengelolaan atas pemanfaatan aset, yang meliputi inventarisasi dokumen, penilaian, penagihan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
- Melakukan optimalisasi pendapatan dari pengelolaan sewa melalui penyesuaian pengenaan tarif sewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
- j. Pengamanan BMD meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Atas hal ini BKAD telah melakukan upaya:
 - pengamanan fisik atas beberapa obyek IP yang berupa tanah kosong antara lain dengan



memasang tanda kepemilikan tanah/papan pengumuman aset;





- pengamanan administrasi terungkap adanya permasalahan aset tanah IP yang tercatat pada Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT) dan/atau Neraca telah berubah status menjadi SHM/Pelepasan Hak. Atas hal ini BKAD telah menelusuri dan menverifikasi konfirmasi dengan beberapa pihak **BKAD** termasuk Kelurahan setempat. melakukan monitoring dan pengendalian atas masa berlaku IP yang sudah jatuh tempo atau kadaluarsa dan pemanfaatan sebagaimana peruntukan sesuai permohonan;
- Pengamanan hukum; Tanah aset daerah yang telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan (Riwayat tanah) segera diajukan permohonan penerbitan sertifikasi atas nama Pemerintah Kota Malang ke Kantor Pertanahan.
- k. Permasalahan tanah IP merupakan permasalahan yang pelik mengingat jumlah obyek yang sangat



- banyak, riwayat tanah yang kompleks dan dinamika lainnya. Namun demikian tetap dilakukan upayaupaya pengamanan atas tanah IP, termasuk konsolidasi dan sinkronisasi dalam rangka pemutakhiran data;
- Salah satu sumber asset tetap bagi Pemerintah Daerah adalah asset tetap yang berasal dari hibah/sumbangan atau kewajiban dari pihak ketiga berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Namun demikian atas 34 PSU yang telah diserahkan pengembang sampai dengan Tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Malang sudah tercatat di KIB A, namum belum didukung bukti sertifikat atas nama Pemerintah Kota Malang. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi menyeluruh terhadap PSU yang telah diserahkan, sehingga didapatkan secara teknis data-data berkaitan dengan detail BMD hasil serah terima PSU dan dapat dikelola dan di tatausahakan di dalam SIMBADA. Pada tahun 2020 telah diajukan sertifikasi ke Kantor Pertanahan, dan selanjutnya di tetapkan Status Pengguna-nya.
- m. Adanya beberapa update peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap *outcome*, *benefit* dan *impact* apabila peraturan tersebut diterapkan;
- n. Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan



- perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bimtek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah;
- o. Pengetahuan dan wawasan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dimiliki masih harus ditingkatkan, mengingat terjadinya perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah. untuk mengikutsertakan aparatur dalam kegiatankegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis, sehingga diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan demikian diharapkan aparatur dapat bersinergi demi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- p. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber yang berasal dari Pusat bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, sehingga diharapkan Perangkat Daerah dapat menyatukan pemahaman dan visi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.







- q. Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah sangat membutuhkan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan yang memadai bagi aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah. Namun demikian pencapaian inovasi tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan yang terintegrasi dengan SIPD.
- Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA, masih memerlukan penyempurnaan. Mapping yang dilakukan Perangkat Daerah banyak mengalami kesulitan pada pencatatan persediaan terutama pada barang habis pakai teranggarkan pada masing-masing kegiatan. Hasil mapping memastikan data barang milik daerah telah Untuk itu dilakukan sesuai dengan Neraca. pengembangan data base / aplikasi SIMBADA menuju versi 47 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukuan, Pelaksanaan, Inventarisasi, Pelaporan Barang Milik Daerah melalui e-Barang Milik Daerah;
- s. Belum optimalnya kemampuan Perangkat Daerah dalam hal ini Subag Umum dan Pengurus Barang Perangkat Daerah dalam pemahaman software aplikasi penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah. Pemecahannya adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi /pendampingan kepada Satuan Kerja (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota

Malang. Maka dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah yang lebih akuntabel dan transparan, Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan asistensi pendampingan bagi Perangkat Daerah khususnya dalam melaksanakan implementasi SIMBADA.

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Organisasi perangkat daerah dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 3.11
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR		Kinerja			Anggaran		
STRATEGIS	KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	%
Meningkatnya	Nilai Sakip	Nilai	Nilai	106.41	16,339,870	13,985,569	85.59	82%
Kinerja Pelayanan		85	90.45	%	,110.00	,532.00		
Badan Pengelolaan								
Keuangan dan								
Aset Daerah								
Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100%	28,978,228,	10,895,197,	37.60	80,99%
kualitas Laporan	laporan keuangan				943.00	269.00		
Keuangan	SKPD bebas salah							
Pemerintah Daerah	saji material							

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif; < 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

1) Indikator Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 106,41 dan capaian anggaran 85,59%, menunjukkan adanya efisiensi



- anggaran dan efektifitas penggunaan sumber dana sebesar 82%
- 2) Indikator Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 37,60 %, menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dana sebesar 80,99%.

 Catatan capaian serapan anggaran yang hanya mencapai 37,60% lebih dikarenakan rendahnya serapan Belanja Tidak

Terduga (BTT) yang penggunaannya harus sesuai ketentuan

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

yang mengaturnya.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau, lebih kegiatan/sub kegiatan. Program juga merupakan alat kebijakan sesuai strategi dalam rangka pencapaian sasaran organisasi sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang di hadapi dan diselesaikan oleh Perangkat Daerah.

Tabel 3.12 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai Sakip	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	Peningkatan pada masing- masing komponen penilaian SAKIP
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	
				Nilai survey kepuasan internal	80.80	83.578	100%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	100%	100%	Melakukan rekonsliasi dan konsolidasi L/K SKPD
mendukung Opini BPK	mendukung Opini BPK		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD	1.02%	2.06%	201.96%	Peningkatan Status Hukum Tanah Aset Daerah sebagai dasar pemanfaatan aset tanah daerah melalaui Kerja Sama Pemanfaatan BMD

Tabel 3.13 Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan Tahun 2023

	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokume n	2 Dokume n	100.00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	
7				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/b ulan	52 Orang/ bulan	100.00%	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas iKeuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokum en	12 Dokum en	100.00%	





PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang terinventarisir	100%	100%	100%	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokum en	12 Dokum en	100.00%	
	Nilai survey kepuasan internal	100%	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	100%	100%	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	80 orang	80 orang	100.00%	
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	100%	100%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100.00%	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.00%	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokume n	3 Dokume n	100.00%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Lapora n	117 Lapor an	97.50%	
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	100%	100%	





	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 paket	14 paket	100.00%	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.00%	
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	
1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100.00%	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit	100.00%	
L	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase Kkesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokume n	2 Dokumen	100.00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	2 Dokume n	2 Dokumen	100.00%	





	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			()	dan Perubahan PPAS	PPAS yang Disusun				
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokume n	2 Dokumen	100.00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokume n	2 Dokumen	100.00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6 Dokume n	4 Dokumen	66.67%	
				Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	132 Orang	100.00%	
		Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kessuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	
		Орин Ві ККі		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokum en	12 Dokum en	100.00%	
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	516 Doku men	516 Doku men	100.00%	
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokum en	12 Dokum en	100.00%	
(000)				Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	12 Dokum en	12 Dokum en	100.00%	



	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	1 Dokume n	1 Dokume n	100.00%	
				Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	190 Orang	190 Orang	100.00%	
		Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	100%	100%	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BLUD dan Laporan Keuangan	7 Laporan	7 Dokumen	100.00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokume n	2 Dokumen	100.00%	
12				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokume n	1 dokumen	25.00%	
0	-110×			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	1 Dokume n	1 dokumen	100.00%	



	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan Pemerintah Daerah				
		Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	100%	60%	60%	
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	5 Laporan	100.00%	
		Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI	100%	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem informasi Pemerintahan Daerah	100%	0%	0.00	
7				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	132 Orang	100.00%	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD	189.22%	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD Dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah	60,12%	60,12%	100%	
4					Persentase BMD Berupa Tanah Yang Telah Bersertifikat	13,17%	21.38%	162.34%	
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokume n	4 Dokume n	200.00%	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Lapora n	100.00%	
/				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100.00%	
5 12				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Lapora n	100.00%	
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	





	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah				
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 Doku men	210 Doku men	140.00%	
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	132 Lapora n	132 Lapor an	100.00%	
•				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	132 Orang	132 Orang	100.00%	

Dari table 3. 10 diatas, dapat dijelaskan program-program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah sebagaimana berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator 1:

Nilai Sakip, dengan target Nilai 85 telah berhasil ercapai sebesar Nilai 90,45 atau tercapai 106,41%.

Sasaran 1 tercapai dengan Sangat Berhasil, menunjukkan capaian target indikator kinerja sasaran sangat berhasil yang didukung melalui 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 Daerah Kabupaten/Kota





Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator 2:

Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material, dengan target 100% telah berhasil tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%.

Sasaran 2 tercapai dengan Berhasil, menunjukkan capaian target indikator kinerja sasaran sangat berhasil yang didukung melalui 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2) Upaya perbaikan dalam rangka capaian sasaran dan program pada perencanaan berikutnya.

Meskipun pada tahun 2023 capaian sasaran tercapai 100% namun diperlukan upaya-upaya perbaikan untuk peningkatan layanan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah antara lain:

- a. Penguatan kualitas aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah yaitu penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah melalui SIPD;
- b. Menyusun strategi penguatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang melalui koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber Pejabat dari Kementerian RI dan/atau Lembaga-Lembaga Negara serta narasumber dari Pemerintah Kota/Kabupaten



- lainnya yang memiliki prestasi/terobosan atas capaian kinerjanya;
- c. Penyiapan regulasi system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan standar harga satuan untuk mendukung pelaksanaan SIPD;
- d. Penguatan kualitas aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Berperan dalam rangka penatausahaan BMD yang andal, cepat, akurat dan informatif melakukan langkah dan terobosan antara lain:
 - a) Percepatan inventarisasi; identifikasi kondisi BMD, keberadaan, pemanfaatan, penggunaan, dokumentasi dan bukti kepemilikan
 - b) Kebutuhan data; dokumen pertanggungjawaban diinformasikan kepada pengurus barang
 - c) Rekonsiliasi; melaksanakan rekonsiliasi antara pengurus barang,/pengurus barang pembantu dan pelaksana akuntansi triwulanan
 - d) Laporan Barang Milik Daerah; penyampaian laporan BMD semesteran
 - e) Laporan BMD dapat digunakan sebagai jurnal akuntansi
- f. Menyusun kebijakan tentang pengelolaan pemanfaatan asset daerah yang meliputi inventarisasi dokumen,penagihan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka peningkatan PAD;
- Menyusun Peraturan Walikota terkait pengelolaan Barang
 Milik Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMD yaitu:
 - Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata
 Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;



- b. Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2021 tentang Tata
 Cara Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik
 Daerah ;
- Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2021 tentang Tata
 Cara Penilaian dan Pemimdahtanganan Barang Milik
 Daerah;
- d. Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2021 tentang Tata
 Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah.
- h. Bersinergi dalam penanganan/fasilitasi konflik pertanahan dan/atau bangunan melalui koordinasi dengan jajaran vertikal; dan jajaran samping
- 3) Evaluasi dan monitoring capaian sasaran/program/kegiatan dan sub kegiatan

Pernyataan kinerja sekretariat/bidang didapatkan melalui rapat evaluasi internal Perangkat Daerah/Sekretariat/Bidang secara berkala. Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Bidang melakukan evaluasi dan monitoring capaian kinerja kegiatan/sub kegiatan mengidentifikasi keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja atas target kinerja subkegiatan. Evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi atas identifikasi/pemetaan, penetapan dan penilaian resiko dalam rangka efektifitas pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Namun demikian pelaksanaan SPI belum sepenuhnya dapat terlaksana optimal. Hal ini diusebabkan:

- a) Terbatasnya SDM yang menggerakkan strategi/kebijakan SPIP;
- b) Kurangnya komitmen para pengambil keputusan dalam mendukunfg SPIP;
- c) Kurangnya pemahaman tentang SPIP sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 24



Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan oleh APIP. Sehingga dalam rangka mendorong SKPD untuk melakukan SPIP, maka APIP melaksanakan kegiatan asistensi/pendampingan dalam rangka:

- a) Pemetaan resiko dan penetapan resiko dari segi aspek
 Strategis Perangkat Daerah
- b) Pemetaan resiko dan penetapan resiko dari segi aspek operasional Perangkat Daerah
- c) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas hasil identifikasi resiko





4) Reward dan Punishment atas pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah

Terhadap keberhasilan/kegagalan capaian pernyataan kinerja Kepala Badan melakukan evaluasi dan monitoring sbb:

- Terhadap keberhasilan, Peringkat IV Penyelenggaraan SAKIP terbaik Kota Malang; Kepala Badan menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih dengan;
 - Menerima tambahan pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk peningkatan kapasitas SDA Manusia ASN dan Non ASN



- pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- ToT implementasi peraturan perundang-undangan (ToT implementasi SIPD, e-BMD);
- Mengikutsertakan ASN pada diklat-diklat teknis untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian penunjang tugas (diklat pengukuran tanah)
- 5) Terhadap kegagalan, Kepala Badan meng-agendakan rapat rapat teknis, rapat-rapat koordinasi Sekretaris/Kepala Bidang dan Pelaksana teknis untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dan merumuskan rencana tindak pemecahan masalah penyebab kegagalan. Dan jika penyebab kegagalan adalah dikarenakan kurang sinergi-nya dengan pihak ketiga/pihak luar, maka Kepala Badan melakukan koordinasi dan konsultasi, baik melalui rapatrapat internal dan/atau koordinasi/konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan/atau melaksanakan Forum Group Discussion menghadirkan Pejabat pada Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber Evaluasi AKIP yang memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variable dalam penerapan komponenkomponen menajemen kinerja sebagaimana tertuang di dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada tahun pelaporan menjadi dasar penerapan target capaian indicator kinerja pada tahun perencanaan berikutnya.





6) Dalam rangka menuju tata Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah serta memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan, maka dilaksanakan sosialisasi Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Malang bagi ASN dan Non ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.



7) Mendukung penguatan perekonomian nasional pasca Pandemi Covid 19, Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa telah mempedomani SE Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan e-Purchasing Kataloq Laptop Produk Dalam Negeri Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri secara nasional Tahun Anggaran 2022, memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%.



B Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 54,99% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.14
Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2023

No.	Uraian	Jumla	h (Rp)	%
NO.	Oraiaii	Anggaran	Realisasi	70
	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,339,870,110.00	14,025,769,532.00	85.84
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51,083,400.00	46,849,400.00	91.71
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41,998,800.00	40,995,400.00	97.61
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,084,600.00	5,854,000.00	64.44
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,425,514,260.00	8,000,677,065.00	84.88
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,328,339,476.00	7,925,401,682.00	84.96
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	97,174,784.00	75,275,383.00	77.46
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,114,000.00	37,798,350.00	75.42
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50,114,000.00	37,798,350.00	75.42
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	671,908,700.00	626,367,863.00	93.22
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	671,908,700.00	626,367,863.00	93.22
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,212,065,000.00	1,890,537,337.00	85.46
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,889,900.00	11,746,613.00	98.79
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	591,606,200.00	587,665,793.00	99.33
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00



		Jumla	h (Rp)	0.4
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	197,339,500.00	153,553,713.00	77.81
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	63,270,000.00	37,166,500.00	58.74
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,297,959,400.00	1,050,404,718.00	80.93
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,941,798,000.00	1,821,365,199.00	93.80
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,741,798,000.00	1,683,383,199.00	96.65
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	137,982,000.00	68.99
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,151,233,350.00	860,247,448.00	74.72
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	432,880,000.00	305,334,000.00	70.54
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182,125,800.00	70,852,485.00	38.90
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207,190,000.00	186,686,300.00	90.10
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	329,037,550.00	297,374,663.00	90.38
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836,153,400.00	741,926,870.00	88.73
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	836,153,400.00	741,926,870.00	88.73
	Sasaran: Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendukung Opini BPK			
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	22,779,387,283.00	7,151,119,718.00	31.39
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,803,682,450.00	1,360,875,750.00	75.45
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	176,750,000.00	110,400,000.00	62.46
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	136,743,100.00	126,473,250.00	92.49
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	367,097,500.00	306,484,000.00	83.49





		Jumla	h (Rp)	
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	162,685,000.00	153,521,500.00	94.37
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	736,004,950.00	507,199,500.00	68.91
2.1.6	Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	224,401,900.00	156,797,500.00	69.87
2.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,656,287,900.00	1,456,138,077.00	87.92
2.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	543,195,900.00	530,073,437.00	97.58
2.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	109,331,600.00	97,666,600.00	89.33
2.2.3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	49,119,750.00	48,906,600.00	99.57
2.2.4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	73,899,750.00	66,176,000.00	89.55
2.2.5	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	35,275,000.00	34,684,000.00	98.32
2.2.6	Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	845,465,900.00	678,631,440.00	80.27
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,038,756,200.00	862,231,542.00	83.01
2.3.1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	864,036,250.00	755,928,792.00	87.49
2.3.2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	69,165,000.00	67,257,950.00	97.24
2.3.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	75,444,950.00	27,444,800.00	36.38





		Jumla	h (Rp)	
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.3.4	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	30,110,000.00	11,600,000.00	38.53
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	17,468,110,733.00	2,875,454,349.00	16.46
2.4.1	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17,468,110,733.00	2,875,454,349.00	16.46
2.5	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	812,550,000.00	596,420,000.00	73.40
2.5.1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	812,550,000.00	596,420,000.00	73.40
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6,198,841,660.00	3,744,077,551.00	60.40
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	6,198,841,660.00	3,744,077,551.00	60.40
3.1.1	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	22,890,000.00	-	0.00
3.1.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	797,630,800.00	214,520,000.00	26.89
3.1.3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	185,005,000.00	171,747,000.00	92.83
3.1.4	Pengamanan Barang Milik Daerah	2,519,215,810.00	1,300,934,995.00	51.64
3.1.5	Penilaian Barang Milik Daerah	1,434,962,000.00	1,097,500,300.00	76.48
3.1.6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	167,599,850.00	148,119,500.00	88.38
3.1.7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	374,300,000.00	274,894,500.00	73.44
3.1.8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	492,590,000.00	470,616,256.00	95.54
3.1.9	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	38,573,200.00	-	0.00
3.1.10	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	166,075,000.00	65,745,000.00	39.59
	TOTAL	45,318,099,053.00	24,920,966,801.00	54.99



Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2019 sampai tahun 2023, maka pada tahun 2023 ini pagu anggaran yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah mengalami penurunan. Pada tahun 2021 pagu anggaran tertinggi yaitu sebesar Rp 114.829.499.942, dikarenakan belanja tidak terduga (BTT) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sejak tahun anggaran 2021 penganggarannya pada BKAD selaku SKPD tidak lagi pada BKAD selaku SK-PKD. Perkembangan pagu anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 3.15

Perbandingan Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dengan Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, 2022 dan

_	-			_	
т	ah	111	n	2	ი23
- 1	7 1			_	1/.1

TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
14.555.172.900	15.241.386.200	15.818.875.300	114.829.499.942	74.489.875.460	

Gambar 3.4

Perbandingan Pagu Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2023 dengan Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023



Dari pagu anggaran yang diterima Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 45.318.099.053,00 (Empat puluh lima milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah), selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 3 (tiga) program yang tertuang di 14 (empat belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan.



Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Per Program
Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.339.870.110,00	14.025.769.532,00	85,84
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	22.779.387.283,00	7.151.119.718,00	31,39
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.198.841.660,00	3.744.077.551,00	60,40
		45.318.099.053,00	24.920.966.801,00	54,99

Terlihat pada tabel di atas, realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 24.920.966.801,00 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah), atau 54,99%.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2019 tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 penyerapan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 mengalami penurunan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Dapat diketengahkan disini bahwa kurang optimalnya penyerapan anggaran pada tahun 2023 antara lain disebabkan karena:

- 1) Capaian % serapan anggaran pada program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 31,39% adalah dari serapan Belanja Tidak Terduga sangat rendah, yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang mengatur.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; serapan anggaran 68,99%, disebabkan terkendalanya bangunan eks. Kantor Kelurahan Blimbing yang masih dipakai untuk Gudang penyimpanan Barang Milik Daerah yang dalam proses penjualan dan/atau penghapusan sehingga belum dapat dilakukan perbaikan
- 3) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; serapan anggaran 62,46%, adalah disebabkan tidak seluruhnya anggaran penggandaan buku dicairkan, setelah disepakati bersama legislatif, penyampaian draf KUA/PPAS melalui softcopy
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran; serapan anggaran 68.91% disebabkan terdapat 1 kajian/study tentang Tukar Guling dan 1 jasa konsultansi penyusunan SHS tidak dapat dilakukan.



- Khusus untuk SHS, pada tahun 2023 hanya menyusun draf penyempurnaan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
- 5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah; serapan anggaran 36.38%, disebabkan karena pelimpahan kasus Tuntutan Ganti Kerugian di Tingkat Sidang Majelis hanya 1 (satu) kasus dari 4 (empat) kasus yang dianggarkan.
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; serapan anggaran 38.53%, disebabkan draf/Rancangan Peraturan Walikota masih di bagian Hukum menunggu harmonisasi, sehingga belanja penggandaan dan sosialisasi tidak dapat di cairkan
- 7) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serapan anggaran 16.46% dengan sisa anggaran Rp. 14,592,656,384.00, karena penggunaan Belanja Tidak Terduga harus sesuai ketentuan yang mengatur
- 8) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; serapan anggaran 0%. Serapan anggaran mencapai 0%, namun 4 (empat) rancangan Peraturan Walikota Malang sudah disampaikan ke Bagian Hukum untuk proses harmonisasi.
- 9) Penatausahaan Barang Milik Daerah; serapan anggaran 26.89%. disebabkan penganggaran pendampingan aplikasi e-BMD sebagai implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 belum dapat dilaksanakan menunggu tahapan-tahapan migrasi data dari SIMBADA ke aplikasi e-BMD yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri selesai.
- 10) Pengamanan Barang Milik Daerah; serapan anggaran 51.64%, disebabkan belanja pengukuran untuk sertifikasi tidak terserap seluruhnya tergantung oleh berkas sertifikasi yang diajukan Pemerintah Kota Malang diselesaikan/diproses oleh Kantor Pertanahan
- 11) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; serapan anggaran 0%, disebabkan anggaran untuk pengadaan jasa konsultasi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak terserap, ketika tahapan migrasi data BMD dari SIMBADA ke aplikasi e-BMD belum selesai.



Terhadap capaian serapan/realisasi anggaran tersebut diatas telah dilakukan evaluasi internal berjenjang pada Sekretariat dan Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Lebih jelasnya untuk realisasi anggaran disajikan pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2023 dengan Tahun 2018, Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

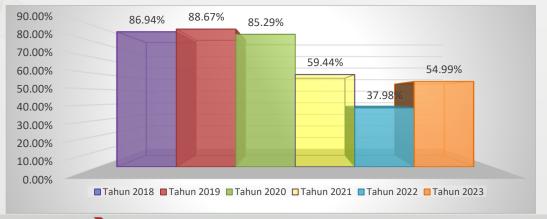
URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
TARGET	14.555.172.900	15.241.386.200	15.818.875.300	114.829.499.942	74.489.875.460	45.318.099.053
REALISASI	12.654.403.996	13,514,207,489	13.492.317.450	68.258.906.470	28.287.879.916	24.920.966.801
%	86,94	88,67	85,29	59,44	37,98	54,99

Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023

Gambar 3.5



Gambar 3.6
Persentase Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023







Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2023. Di dalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 dan perubahannya.

Mengacu pada 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) indikator kinerja, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang berhasil dicapai 100%, yaitu Nilai Sakip dan Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK. Dengan demikian kedua indikator tersebut menunjukkan capaian indikator dengan penilaian berhasil.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan "Berhasil" dicapai karena nilai capaiannya rata-rata mencapai 100%. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian Indikator Kinerja Utama dan/atau Indikator Kinerja Sasaran, pengukuran kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
Kiner Bada	ngkatnya ja Pelayanan n Pengelolaan ngan dan Aset ah	Nilai Sakip	Nilai 85	Nilai 90,45	106.41%
kualit Keua	ngkatnya as Laporan ngan erintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material	100%	100%	100%



Sementara pada kinerja keuangan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp 24.920.966.801,00 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah), dari pagu Rp 45.318.099.053,00 (Empat puluh lima milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah) atau 54,99%. Dan mengalami kenaikan sebesar 54,99% - 37,98% = 16,92%. Dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2022. Dengan membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja anggaran, menunjukkan tingkat efisiensi atas penggunaan sumberdaya positif (+) dalam rangka pencapaian sasarannya.

Evaluasi AKIP yang memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variable dalam penerapan komponen-komponen menajemen kinerja sebagaimana tertuang di dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada tahun pelaporan menjadi dasar penerapan target capaian indicator kinerja pada tahun perencaan berikutnya

Namun demikian secara kualitas pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang masih menjadi kendala yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi internal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan diatasnya.

Selain itu adalah pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur sebagai bahan pengukuran capaian kinerja dan keuangan SKPD dan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pengendalian Sistem Pengendalian Intern atas Rencana Tindak Pengendalian yang telah ditetapkan sesuai jadwal waktu.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.



LAMPIRAN PERUBAHAN RENSTRA 2018 - 2023



SALINAN NOMOR 20/2021

> PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 fabhun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pentapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

5.1-1

S. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan daerah dan keuangan daerah, sehingga daerah mempunyai dan pelelusasan dan kewenangan yang luas dalam melaksanakan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah daerah saat ini dan di masa yang akan datang dituntut untuk memiliki prakarsa kemandirian dan inisiatif mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam mendukung fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan di atas dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka perlu disusun dokumen perencanaan lima tahunan dalam bentuk perencanaan strategis satuan keripa perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RYMDI) Jahun 2018-2023 Kota Malang.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RR/MD). Adapun Pengertian Renstra PD adalah kerangka dasar yang menjembatani antara visi yang sangat abstrak dengan situasi permasalahan yang sangat nyata, dan merupakan suatu upaya untuk menata dan mengendalikan secara fundamental yang mengarahkan dan membentuk sebuah organisasi kepada apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dengan fokus ke masad benan.

Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dinamika perencanaan sampai pada tahun ketiga implementasi RPJMD membawa konsekuensi penyesuaian subtansi RPJMD. Berdasarkan Pasal 342 Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan papibla:

7







MATRIK RENSTRA PERUBAHAN

Tulinan	S	K	Program,	Indikator)ata Capa Perend						Target Kine	erja Program d	lan Kerangka Pe	endanaan			Kondisi Pada	•	Unit Kerja PD	1.1:
Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018	20	19	20	20	2	.021	202	2	2	2023	Periode	Renstra	Penanggu	Lokasi
		е	Sub Regiatari		1	2010	Γarget	Rp.	Farget	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tercapainya				Persentase	87,59	100%					100%		100%		100%		100%		BKAD	Kota
Optimalisas				laporan	%															Malang
i				keuangan																
Pengelolaan				SKPD																
Keuangan				berkualitas																
dan Aset				mendukung																
Daerah				Opini BPK					-		212		212							
Yang Transparan	Meningkatnya Kinerja			Nilai SAKIP	77,76	84,22					84,8		84,9		85		85		BKAD	Kota Malang
dan	Pelayanan		PROGRAM	Persentase							100%	21.701.91	100%	21.734.77	100%	29.955.88	100%	88.227	Sekretariat	Kota
Akuntabel	Badan		PENUNJANG	dokumen								7.347,00		5.347,00		6.305,00		.120.1	BKAD	Malang
	Keuangan		URUSAN	perencanaan,														34,00		
	dan Aset		PEMERINTAHA	keuangan dan																
	Daerah		N DAERAH	pelaporan																
			KABUPATEN/K	yang disusun																
			OTA	tepat waktu																
				Persentase							100%	4.672.249.	100%	3.644.554	100%	4.877.133	100%	13.193	Sekretariat	Kota
				sarana dan								635,00		.500,00		.800,00		.937.9	BKAD	Malang
				prasarana														35,00		
				dalam kondisi																
				baik																
				Nilai survey							80.4	637.411.6	80.6	237.191.6	80.8	766.000.0	80.8	1.640.	Sekretariat	Kota
				kepuasan								00,00		00,00		00,00		603.20	BKAD	Malang
				internal														0,00		









	T		Program,	Indikator)ata Capa Perenc						Target Kine	erja Program d	lan Kerangka Pe	endanaan			Kondisi Pada	-	Unit Kerja PD		
À	Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018)19)20		021	202			023	Periode		Penanggu	Lokasi
			е					_	_	Target	_	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
	1	2	3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai	6	7	8	9	10	11	12 100%	13 325.840.5 00,00	14 100%	15 238.698.5 00,00	16 100%	17 503.200.0 00,00	18 100%	19 1.067. 739.00 0,00	Sub Bag Perencana an dan Keuangan	Kota Malang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun							1 dokume n Renstra, 2 dokume n Renja	193.970.0 00,00	2 dokumen Renja/RKT	143.970.0 00,00	2 dokum en Renja/ RKT	178.600.0 00,00	1 dokume n Renstra , 6 dokume n Renja/	516.54 0.000, 00	Sub Bag Perencana an dan Keuangan	Kota Malang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							9 dokume n	75.740.00 0,00	8 dokumen	48.114.00 0,00	8 dokum en	264.000.0 00,00	25 dokume n	387.85 4.000, 00	Sub Bag Perencana an dan Keuangan	Kota Malang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja							2 dokume n	56.130.50 0,00	2 dokumen	46.614.50 0,00	2 dokum en	60.600.00	6 dokume n	163.34 5.000, 00	Sub Bag Perencana an dan Keuangan	Kota Malang









Tujuan	Sasaran	K	Program, Kegiatan, dan	Indikator)ata Capa Perenc							<u> </u>	lan Kerangka Pe				Kondisi Pada	Akhir	Unit Kerja PD	Lokasi
. ajaa	- Cuourum	d e	Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018)19		020		021 Dn	Z02 Target			2023	Periode	Renstra Rp.	Penanggu ng Jawab	London
1	2	3	4	5	6	7	narget 8	кр.	Target	11	Target 12	Rp.	14	Rp. 15	Target 16	Rp.	Target 18	кр. 19	20	21
	-		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu		·					100%	21.376.07 6.847,00	100%	21.496.07 6.847,00	100%	29.452.68 6.305,00	100%	72.324 .839.9 99,00	Sub Bag Perencana an dan Keuangan	Kota Malang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN							12 dokume n	21.278.41 1.847,00	12 dokumen	21.418.41 1.847,00	12 dokum en	28.947.67 9.305,00	36 dokume n	71.644 .502.9 99,00	Sub Bag Perencana an dan Keuangan	Kota Malang
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasiKeuangan SKPD	Jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan							500 SPM	97.665.00 0,00	500 SPM	77.665.00 0,00	500 SPM	505.007.0 00,00	1500 SPM	680.33 7.000, 00	Sub Bag Perencana an dan Keuangan	Kota Malang
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir							100%	103.120.0 00,00	100%	104.130.0 00,00	100%	104.130.0 00,00	100%	311.38 0.000, 00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Malang
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah							19 unit kendara an bermoto r	72.480.00 0,00	23 unit kendaraan bermotor	73.490.00 0,00	23 unit kendar aan bermot or	73.490.00 0,00	23 unit kendara an bermoto r	219.46 0.000, 00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Malang
-1/ >-			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah							2 dokume n	30.640.00 0,00	2 dokumen	30.640.00 0,00	2 dokum en	30.640.00 0,00	6 dokume n	91.920 .000,0 0	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Malang









Tujuan Sasaran		K	Program,	Indikator)ata Capa Perenca						Target Kind	erja Program d	lan Kerangka P	endanaan			Kondisi Pada	•	Unit Kerja PD	
Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018		19	20		2	.021	202	22	2	2023	Periode	Renstra	Penanggu	Loka
		е					Γarget		Farget	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian							100%	637.411.6 00,00	80,60%	237.191.6 00,00	80,80 %	766.000.0 00,00	80,80%	1.640. 603.20 0,00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Mala
			Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi							300 orang	167.460.0 00,00	100 orang	64.640.00 0,00	450 orang	250.000.0 00,00	850 orang	482.10 0.000, 00	Sub Bag Umum dan Kepegawaia n	Kota Mala
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis							300 orang	469.951.6 00,00	140 orang	172.551.6 00,00	300 orang	516.000.0 00,00	740 orang	1.158. 503.20 0,00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Mala
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi							100%	2.549.934. 600,00	100%	2.185.370 .800,00	100%	3.145.000 .000,00	100%	7.880. 305.40 0,00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kot Mal
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								6 jenis	40.183.80 0,00	6 jenis	59.600.00 0,00	6 jenis	46.000.00 0,00	18 jenis	145.78 3.800, 00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kot Ma
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia							77 jenis	837.738.0 00,00	77 jenis	625.098.0 00,00	77 jenis	444.000.0 00,00	77 jenis	1.906. 836.00 0,00	Sub Bag Umum dan Kepegawaia n	Kot Ma
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegi atan insidentil							1 kali	28.332.80 0,00	1 kali	23.332.80 0,00	1 kali	25.000.00 0,00	3 kali	76.665 .600,0 0	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kot Mal







Tuinan	Canada	K	Program,	Indikator)ata Capa Perenc						Target Kine	erja Program o	dan Kerangka Pe	endanaan			Kondisi Pada	•	Unit Kerja PD	l aless
Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018	20			20	2	021	202	2	2	2023	Periode	Renstra	Penanggu	Lokas
		е			1	2010	Γarget	Rp.	Farget	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan							10 jenis	107.345.0 00,00	6 jenis	126.545.0 00,00	6 jenis	241.000.0 00,00	22 jenis	474.89 0.000, 00	Sub Bag Umum dan Kepegawai an	Kota Malan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan							3 surat kabar	35.400.00 0,00	3 surat kabar	35.400.00 0,00	3 surat kabar	36.000.00 0,00	3 surat kabar	106.80 0.000, 00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Malan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah							120 kali	1.500.935. 000,00	120 kali	1.315.395 .000,00	126 kali	2.353.000 .000,00	366 kali	5.169. 330.00 0,00	Sub Bag Umum dan Kepegawai an	Kota Malar
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD							100%	1.029.136. 835,00	100%	248.179.9 00,00	100%	567.000.0 00,00	100%	1.844. 316.73 5,00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Malar
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor							9 jenis	1.029.136. 835,00	6 jenis	224.020.9 00,00	6 jenis	567.000.0 00,00	17 jenis	1.820. 157.73 5,00	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Kota Mala
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor									2 jenis	24.159.00 0,00			2 jenis	24.159 .000,0 0	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Mala
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti							100%	829.554.1 00,00	100%	770.767.7 00,00	100%	787.897.7 00,00	100%	2.388. 219.50 0,00	Sub Bag Umum dan	Kota Mala







Tujuan	Sasaran	K o d e	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja)ata Capa Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja Pada Akhir		Unit Kerja PD			
					2017		2019		2020		2021		2022		2023		Periode Renstra		Penanggu	Lokas
							_	-	Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pemerintah Daerah																Kepegawa ian	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik							39.000 surat	438.956.4 00,00	39.000 surat	394.246.4 00,00	38.600 surat	397.300.0 00,00	116.600 surat	1.230. 502.80 0,00	Sub Bag Umum dan Kepegawaia n	Kota Mala
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, dan internet							12 bulan	42.117.70 0,00	12 bulan	42.117.70 0,00	12 bulan	42.117.70 0,00	36 bulan	126.35 3.100, 00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Mala
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor							3 jenis	107.220.0 00,00	3 jenis	107.220.0 00,00	3 jenis	107.220.0 00,00	9 jenis	321.66 0.000, 00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Mal
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan							750m2	241.260.0 00,00	1180 m2	227.183.6 00,00	1180 m2	241.260.0 00,00	1180 m2	709.70 3.600, 00	Sub Bag Umum dan Kepegawaia n	Kot Mal
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100%	160.504.1 00,00	100%	336.106.1 00,00	100%	273.106.1 00,00	100%	769.71 6.300, 00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Mal
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas/operasio nal yang dipelihara							18 unit	160.504.1 00,00	38 unit	336.106.1 00,00	38 unit	273.106.1 00,00	94 unit	769.71 6.300, 00	Sub Bag Umum dan Kepegawa ian	Kota Mal







Tuiues	Sasaran	K	Program,	Indikator)ata Capa Perenc						Target Kine	erja Program o	dan Kerangka Pe	endanaan			Kondisi Pada	•	Unit Kerja PD	Lokas
Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018	20		20		2	021	202		2	2023	Periode	Renstra	Penanggu	Lokas
		е	, i					_	Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	100%	100%					100%		100%		100%		100%		BKAD	Kota Malar
			PROGRAM PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH	Persentase L/K SKPD Yang Berkualitas Mendukung Opini BPK RI							100%	70.243.35 9.154,00	100%	23.024.89 8.700,00	100%	19.680.99 2.200,00	100%	112.94 9.250. 054,00	Bidang Anggaran & Perbendahara an, Bidang Akuntansi dan Penatausaha an Aset Daerah	
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan							100%	2.040.893. 400,00	100%	1.129.786 .200,00	100%	2.234.590 .800,00	100%	5.405. 270.40 0,00	Bidang Anggaran dan Perbenda haraan	Kota Malar
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang tersusun							2 dokume n Nota Kesepak atan	474.446.2 00,00	2 dokumen Nota Kesepakatan	210.446.2 00,00	2 dokum en Nota Kesep akatan	474.446.2 00,00	6 dokume n Nota Kesepa katan	1.159. 338.60 0,00	Sub Bidang Perencana an dan Penyusun an Anggaran	Kota Malan
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen yang tersusun							2 dokume n Nota Kesepak atan	113.120.0 00,00	2 dokumen Nota Kesepakatan	113.120.0 00,00	2 dokum en Nota	113.120.0 00,00	6 dokume n Nota Kesepa katan	339.36 0.000, 00	Sub Bidang Perencana an dan Penyusun	Kota Malar







6	K	Program,	Indikator)ata Capa Perenc						Target Kine	rja Program o	dan Kerangka Pe	endanaan			Kondisi Pada A	•	Unit Kerja PD	
Sasaran	d		Kinerja	2017	2018			1		20		202		2		Periode I	Renstra	Penanggu	Loka
	е					_		_		Target		Target		Target		Target	Rp.	ng Jawab	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	-	17	18	19		2′
														Kesep akatan				an Anggaran	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi							129 entitas	143.300.3 00,00	129 entitas	143.300.3 00,00	129 entitas	143.300.3 00,00	387 entitas	429.90 0.900, 00	Bidang Administra si	Kota Mala
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi									129 entitas	143.300.3 00,00	129 entitas	143.300.3 00,00	258 entitas	286.60 0.600, 00	Sub Bidang Administra si Anggaran	Kota Mal
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun							1 Ranperda, 1 Ranperwal yang tersusun	416.101.4 00,00	1 Ranperda, 1 Ranperwal yang tersusun	286.101.4 00,00	1		3 Ranperda 3 Ranperwa I yang tersusun	0,00	Sub Bidang Perencana an dan Penyusun an Anggaran	Kot Mal
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun							1 Ranperd a dan 1 Ranper wal yang tersusun	130.395.0 00,00	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	130.395.0 00,00	1 Ranper da dan 1 Ranper wal yang tersusu n	130.395.0 00,00	3 Ranper da dan 3 Ranper wal yang tersusu n	391.18 5.000, 00	Sub Bidang Perencana an dan Penyusun an Anggaran	Kota Mala
	Sasaran 2	Sasaran o d e	Sasaran O d e Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2 3 4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perjabaran APBD Koordinasi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Kepala Daerah	Sasaran O d e Regiatan, dan Sub Kegiatan 2 3 4 5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Penyusunan dan Verifikasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Kepala Daerah tentang Penjabaran	Sasaran o d e Regiatan, dan Sub Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2 3 4 5 6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD asistensi Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Penyusunan dan Verifikasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Renperad dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Penjabaran	Sasaran o d e	Sasaran O d Sub Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rindikator Kinerja 2 3 4 5 6 7 8 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Peraturan Repala Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Caerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Caerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Caerah tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Kepala Daerah tentang Penjabaran Kepala Daerah tentang Penjabaran	Sasaran de de Sub Kegiatan de	Name	Sasaran de Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan de Perencanaan (Sub Kegiatan) (Sub	Sasaran O d Sub Kegiatan, dan Sub Kegiatan e e Sub Kegiatan 2017	Program Registan Amount Perencanan Perencananan Perencanananan Perencananan Perencanananan Perencananan Perencanananan Perencananana	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Refail Refa	Nordinasi	Program, Registan, dan Sub Kegiatan Sub Keg	Perrogram, Kegistan, dan Sub Kegistan Registan, dan Sub Kegistan Registan Re	Pagram Program Registan	No. Condinasi	Page Program, Registan, day Sub Kegiatan Registration Regi







Tuinne	S	K	Program,	Indikator)ata Capa Perenc						Target Kine	erja Program o	dan Kerangka Pe	endanaan			Kondisi Pada	•	Unit Kerja PD	
Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018	20		20	-	2	021	202		2	2023	Periode	Renstra	Penanggu	Loka
		е	-				Γarget		Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Ranperwal yang tersusun							3 Ranper wal	120.070.0 00,00	6 Ranperwal	48.870.00 0,00	5 Ranper wal	120.070.0 00,00	14 Ranper wal	289.01 0.000, 00	Sub Bidang Administra si Anggaran	Kota Mala
			Pembinaan penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pembinaan							290 orang	643.460.5 00,00	132 orang	54.253.00 0,00	290 orang	693.857.6 00,00	712 orang	1.391. 571.10 0,00	Sub Bidang Administra si Anggaran	Kota Mala
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaa n Daerah	Persentase kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku							100%	1.282.874. 000,00	100%	1.097.773 .100,00	100%	1.282.874 .000,00	100%	3.663. 521.10 0,00	Bidang Anggaran dan Perbenda haraan	Kota Mala
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen laporan hasil penatausahaan keuangan							12 dokume n	892.200.0 00,00	12 dokumen	859.200.0 00,00	12 dokum en	892.200.0 00,00	36 dokume n	2.643. 600.00 0,00	Sub Bidang Perbenda haraan	Kota Mala
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan	Jumlah dokumen arsip SKPD yang tertata							39.000 Dokume n	121.804.0 00,00					39.000 Dokume n	121.80 4.000, 00	Sub Bidang Perbenda haraan	Kota Mala
			Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD yang terbit							516 SPD		516 SPD	121.804.0 00,00	516 SPD	121.804.0 00,00	1032 SPD	243.60 8.000, 00	Sub Bidang Perbendahar aan	
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Jumlah dokumen yang tersusun											12 dokum en	130.000.0 00,00	12 dokume n	130.00 0.000, 00	Sub Bidang Perbenda haraan	Kota Mala







Tuites	C	K	Program,	Indikator)ata Capa Perend						Target Kind	erja Program o	dan Kerangka Pe	endanaan			Kondisi Pada		Unit Kerja PD	Labori
Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018	-	19)20		.021	202			2023	Periode		Penanggu	Lokasi
		е	-				_	_	Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer																	
		_	Lainnya	L selek	-										40	400,000,0	40	400.00	0.1	IZ-1-
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen yang tersusun							1	51.460.00	1 Ranperwal	51.460.00	12 dokum en	130.000.0 00,00	12 dokume n	130.00 0.000, 00	Sub Bidang Perbenda haraan	Kota Malang
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran	Ranperwal yang tersusun							Ranper wal	0,00	i Kanperwai	0,00	Ranper wal	0,00	Ranper wal	0.000, 00	Bidang Perbenda haraan	Malang
Jo '			Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjaw aban Sub Kegiatan																	







	Tuitean	C	K	Program,	Indikator)ata Capa Perenc						Target Kine	erja Program d	lan Kerangka Pe	endanaan			Kondisi Pada	-	Unit Kerja PD	Lokasi
1	Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018		19)20		021	202			2023	Periode		Penanggu	Lokasi
			е	- Cas Hogistian				_	_	Target	_	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembinaan Penatausahaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pembinaan							190 orang	217.410.0 00,00	190 orang	65.309.10 0,00	190 orang	217.410.0 00,00	570 orang	500.12 9.100, 00	Sub Bidang Perbenda haraan	Kota Malang
X				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak							100%	65.967.93 5.754,00	100%	20.000.00	100%	15.000.00 0.000,00	100%	100.96 7.935. 754,00	Sub Bidang Perbenda haraan	Kota Malang
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah kali pendanaan darurat dan mendesak							5 kali	65.967.93 5.754,00	5 kali	20.000.00 0.000,00	5 kali	15.000.00 0.000,00	15 kali	100.96 7.935. 754,00	Sub Bidang Perbenda haraan	Kota Malang
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah							100%	372.024.8 00,00	100%	215.296.8 00,00	100%	539.484.8 00,00	100%	1.126. 806.40 0,00	Sub Bidang Perbenda haraan	Kota Malang
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dipelihara							1 sistem informas i	372.024.8 00,00	1 sistem informasi	47.836.80 0,00	1 sistem inform asi	372.024.8 00,00	1 sistem informa si	791.88 6.400, 00	Sub Bidang Perbenda haraan	Kota Malang









T	Constant	K	Program,	Indikator)ata Capa Perenc						Target Kine	rja Program d	lan Kerangka Pe	endanaan			Kondisi Pada	•	Unit Kerja PD	Lale
Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018	20		20		2	021	202		2	.023	Periode	Renstra	Penanggu	Lokas
		е		_	1		_	_	Γarget		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah entitas yang mendapat pembinaan									129 entitas	167.460.0 00,00	129 entitas	167.460.0 00,00	258 entitas	334.92 0.000, 00	Sub Bidang Perbenda haraan	Kota Malan
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase L/K SKPD Yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)							100%	579.631.2 00,00	100%	582.042.6 00,00	100%	624.042.6 00,00	100%	1.785. 716.40 0,00	Bidang Akuntansi dan Penatausa haan Aset Daerah	Kota Malang
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jenis dokumen laporan yang tersusun							7 Dokume n	354.951.2 00,00	7 Dokumen	397.307.6 00,00	7 Dokum en	397.307.6 00,00	21 Dokume n	1.149. 566.40 0,00	Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan	Kota Malang
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	Jumlah Ranperda dan Ranperwal yang tersusun							1 Ranperd a dan 1 Ranper wal yang tersusun	76.120.00 0,00	1 Ranperda dan 1 Ranperwal yang tersusun	77.890.00 0,00	1 Ranper da dan 1 Ranper wal yang tersusu n	77.890.00 0,00	3 Ranper da dan 3 Ranper wal yang tersusu n	231.90 0.000, 00	Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan	Kota Malang







Tuinan	Саланан	K	Program,	Indikator)ata Capa Perenca						Target Kine	erja Program o	dan Kerangka Pe	endanaan			Kondisi Pada	-	Unit Kerja PD	Lokas
Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018	20		20		2	021	202		2	2023	Periode		Penanggu	Lokas
		е							Target		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun							4 dokume n	58.160.00 0,00	4 dokumen	58.445.00 0,00	4 dokum en	58.445.00 0,00	12 dokume n	175.05 0.000, 00	Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan	Kota Mala
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Ranperwal yang tersusun							1 Ranper wal	90.400.00	1 Ranperwal	48.400.00 0,00	1 Ranper wal	90.400.00	3 Ranper wal	229.20 0.000, 00	Sub Bidang Akuntansi Dan Pelaporan	Kota Mala
			PROGRAM PENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD							0,69%	4.461.644. 965,00	0,90%	5.276.991 .700,00	1,02%	5.552.917 .200,00	1,02%	15.291 .553.8 65,00	Bidang Akuntansi dan Penatausa haan Aset Daerah, Bidang Pemanfaat an Aset Daerah	Kota Mala







	_	K	Program,	Indikator)ata Capa Perenc						Target Kine	erja Program o	dan Kerangka Pe	endanaan			Kondisi Pada	-	Unit Kerja PD	
Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018	20	19	20	20	2	.021	202	2	2	2023	Periode	Renstra	Penanggu	Lokasi
		е	Sub Regiatali		2017	2010	Farget	Rp.	Farget	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD Dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah							40,17%	974.885.6 00,00	53,45%	922.896.6 00,00	60,12 %	1.454.830 .800,00	60,12%	3.352. 613.00 0,00	Bidang Akuntansi dan Penatausa haan Aset Daerah	Kota Malang
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Ranperwal yang tersusun									1 Ranperwal	41.000.00 0,00	1 Ranper wal	41.110.00 0,00	2 Ranper wal	82.110 .000,0 0	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah	Kota Malang
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Ranperwal yang tersusun							1 Ranper wal	63.830.00 0,00			1 Ranper wal	146.100.0 00,00	2 Ranper wal	209.93 0.000, 00	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah	Kota Malang
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Ranperwal yang tersusun									1 Ranperwal	44.812.00 0,00	1 Ranper wal	84.812.00 0,00	2 Ranper wal	129.62 4.000, 00	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah	Kota Malang
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun									2 dokumen	33.400.00 0,00	2 dokum en	50.400.00 0,00	4 dokume n	83.800 .000,0 0	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah	Kota Malang
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah							12 dokume n	241.510.0 00,00	12 dokumen	345.208.0 00,00	12 dokum en	309.928.0 00,00	36 dokume n	896.64 6.000, 00	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah	Kota Malang









		K	Program,	Indikator)ata Capa Perenc						Target Kine	erja Program o	lan Kerangka P	endanaan			Kondisi Pada	•	Unit Kerja PD	
Tujuan	Sasaran	d	Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018	20	19	20	20	2	021	202	22	2	.023	Periode	Renstra	Penanggu	Lokasi
		е	Sub Regiatan		2017	2010	Γarget	Rp.	Farget	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	ng Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah obyek aset dan barang milik daerah yang terinventarisasi							878 obyek	152.832.8 00,00	180 obyek	192.196.0 00,00	357 obyek	192.196.0 00,00	1.415 obyek	537.22 4.800, 00	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah	Kota Malang
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah entitas peserta rekonsiliasi							134 entitas	210.634.8 00,00	136 entitas	69.316.80 0,00	136 entitas	242.314.8 00,00	406 entitas	522.26 6.400, 00	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah	Kota Malang
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah entitas yang mendapat pembinaan							132 entitas	136.080.0 00,00	132 entitas	30.925.80 0,00	132 entitas	138.865.0 00,00	396 entitas	305.87 0.800, 00	Sub Bidang Pengawasa n dan Pengendali an Aset Daerah	Kota Malan
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan yang tersusun							5 dokume n	169.998.0 00,00	5 dokumen	122.368.0 00,00	5 dokum en	201.068.0 00,00	15 dokume n	493.43 4.000, 00	Sub Bidang Pengawasa n dan Pengendali an Aset Daerah	Kota Malan
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD									2 dokumen laporan	43.670.00 0,00	2 dokum en lapora n	48.037.00 0,00	4 dokume n laporan	91.707 .000,0 0	Sub Bidang Pendataan Aset Daerah	Kota Malang
				Persentase BMD Berupa Tanah Yang Telah Bersertifikat							12,21%	3.486.759. 365,00	12,68%	4.354.095 .100,00	13,37 %	4.098.086 .400,00	13,37%	11.938 .940.8 65,00	Bidang Pemanfaat an Aset Daerah	Kota Malan
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengakuan							100 dokume n, 140	1.938.826. 200,00	100 dokumen, 140 papan,	3.330.310 .200,00	100 dokum en,	2.668.843 .200,00	300 dokume n, 420	7.937. 979.60 0,00	Sub Bidang Pengaman	Kota Malan







	Tuiuan	Sasaran	K	Program, Kegiatan, dan	Indikator)ata Capa Perenc						Target Kine	rja Program d	lan Kerangka Pe	ndanaan			Kondisi Pada	-	Unit Kerja PD	Lokasi
1	Tujuan	Sasaran	d	Sub Kegiatan	Kinerja	2017	2018	20		-	20		021	202			.023	Periode		Penanggu	LUKASI
- 1	1	2	e	4	5	6	7	Farget	_	Target		Target 12	Rp. 13	Target 14	Rp. 15	Target 16	Rp.	Target 18	Rp. 19	ng Jawab 20	21
		2	3	4	aset tanah, Jumlah papan himbauan/pato k yang terpasang, Jumlah sertifikat	0		8	9	10	11	papan, 2500 sertifikat	13	2500 sertifikat	15	140 papan, 2077 sertifik at	17	papan, 7077 sertifikat	19	an Dan Pemelihar aan Aset Daerah	21
				Penilaian Barang Milik Daerah	jumlah dokumen hasil penilaian BMD							10 dokume n	1.262.079. 965,00	10 dokumen	637.181.7 00,00	10 dokum en	1.082.640 .000,00	30 dokume n	2.981. 901.66 5,00	Sub Bidang Pemindaht anganan Dan Penghapu san Aset Daerah	Kota Malang
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Ijin yang diterbitkan							150 ijin	285.853.2 00,00	150 ijin	386.603.2 00,00	150 ijin	346.603.2 00,00	450 ijin	1.019. 059.60 0,00	Sub Bidang Pengguna usahaan Aset Daerah	Kota Malang









PERJANJIAN KINERJA 2023



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

lama : Drs. SUBKHAN, M.A.P

Jabatan : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Malana. 2 Januari 2023 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

> Pembina Utama Muda NIP. 19680408 198809 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	100%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP	85

Program	Anggaran	Keteranga
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 17.340.185.344	APBD
Kabupaten/Kota		
Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 24.357.664.734	APBD
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 5.558.130.634	APBD



Malang, 2 Januari 2023 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

> Drs. SUBKHAN, M.A.P Pembina Utama Muda NIP. 19680408 198809 1 001









DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023



WALIKOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR: 188.45/453 /35.7

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN W.

NOMOR:188.45/234/35.73.112/2019 TENTAL KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANC DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAL

WALIKOTA MALANO

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak la tentang Pedoman Umus Utama di Lingkungan 188.45/234/35.73.112/ Indikator Kinerja Utama Kota Malang Tahun 2019

- b. bahwa untuk menind Indikator Kineria Utama Perangkat Daerah
- dimaksud dalah huruf a Keputusan Walikota

Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kine Utama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dala diktum KESATU dipergunakan untuk Tahun 2021-2023.

Utama Perangkat Daerah untuk Tahun 2018-2020 tet 188.45/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikat Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangk Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malai Tahun 2018-2023.

Keputusan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tangga



17. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	Persentase laporan keuangan SKPD berkualitas mendukung Opini BPK	Jumlah laporan keuangan SKPD berkualitas dibagi jumlah laporan keuangan SKPD Kota Malang dikali 100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji material mendukung Opini BPK	Jumlah laporan keuangan SKPD bebas salah saji material dibagi jumlah laporan keuangan SKPD Kota Malang dikali 100%	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah; Bidang Pemanfaatan Aset Daerah	Laporan Keuangan SKPD

33

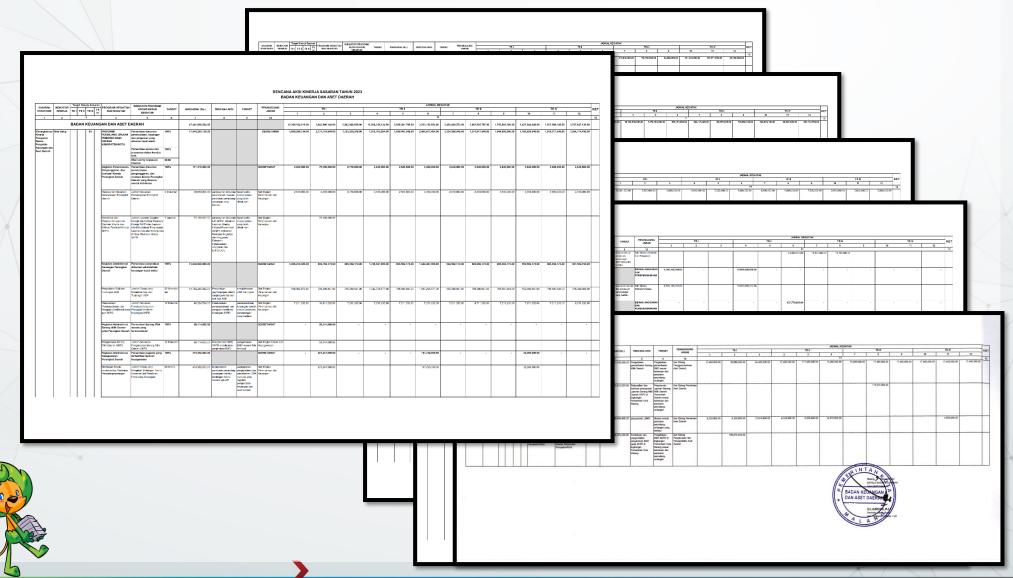
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat
Daerah				







Rencana Aksi 2023



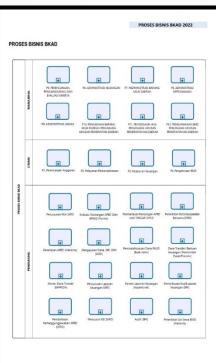


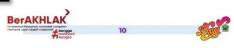


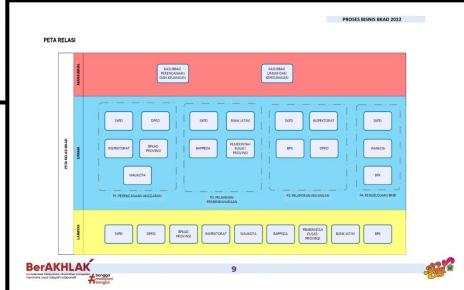


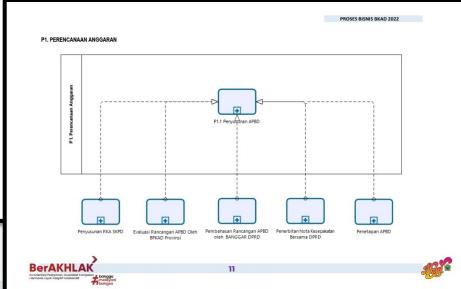
PROSES BISNIS BKAD 2022



















SOP BKAD 2022





PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341) - 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894 Fax. (0341) - 326 025, 328 553 MALANG Kode Pos 65119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR : 188.451/16/5 /35.73.503/2022

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang

- : a. bahwa salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan dan kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan admninistrasi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perlu disusun standarisasi yang baku mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan:
- c. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja aparatur penyelenggara administrasi pemerintahan yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- d. bahwa berdasarkan konsideran huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.



Planeler Dynamical Procedure (INDP)

2. A. MISSEL Tolori (INDP)

A. MISSEL (INDEXES)

Konsep Bentze dan Berga Shari Konsep restata dan Berga Shari Konsep sadah Bentze Shari Sha







Laporan Kinerja Instansi Pemerintan Tahun 2023

LKE SAKIP BKAD TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Sa Jawaban							
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	Jawaban	27						
	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	AA	6						
	eria:	-/		_						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.									
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.									
	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.									
	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.									
	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung k									
	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung	kinerja.								
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar									
	yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran	100000	107	600						
	kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan	9,00	A	8,1						
	(cascading) disetiap level secara logis, serta									
Mail	memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) eria:									
	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.									
	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat wak	du								
	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebuti		Kinoria							
	sebenarnya yang perlu dicapai.	uriari ataa	ranorja							
-		mharkan	kondisi kin	orio						
-	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.									
-	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriter	rio CMAD	T							
	Okuran Kebernasilan (indikator Kinerja) telah memenuni kintel	III SIVIAN	1.							
- 5	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus									
	dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak ser									
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dic	anai (ach	ievable)							
	The state of the s		,,							
	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubu berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang a	kan dicap	oai di setiap							
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hul kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fu									
				tan						
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Peren	canaan K	inerja.							
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan I	Kinerja.								
1.0	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	А	13,						
Krit	eria:									
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang i	ingin dica	pai.							
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang in	gin dicapa	ai.							
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dica	apai deng	an baik, ata	u						
	setidaknya masih on the right track.									
	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian k									
	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan	Kinerja ya	ang ditetapk	an da						
	hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.	Kineria d	alam mewuj	udka						
4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan	remonja di								
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan kondisi/hasil yang lebih baik.		m mencan:	ai						
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan		am mencapa	ai						

2	telah direncanakan,			rja yan					
	PENGUKURAN KINERJA	30,00		27					
2,a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,4					
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpul	an data i	cinerja.						
	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara			or kine					
	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data								
	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam	,,.	J						
	mewujudkan Kineria secara Efektif dan Efisien dan telah	9.00	A	8.1					
	dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	100000		2.5					
1	Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decisio	n Maker) dalam me	enguku					
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur	canaian	kineria var	nn					
	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capalan kinerja yang Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capalan kinerja yang diharapkan.								
	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala,								
	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit								
	dibawahnya secara berjenjang.	штепри	an kinonja	uiiii					
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Info	rmaei (A	nlikaei)						
	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Ind								
	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam	TOTTIAST	гриказі).						
	pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian	15,00	A	13.					
	strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	20,00	- 11						
1	strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan)								
	rengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesualah (pembenan/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilah,								
	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik								
2	Pengukuran Kineria telah menjadi dasar dalam penempatan/o	enghanu	san .lahat:	an haik					
2		enghapu	san Jabata	an baik					
	struktural maupun fungsional.			an baik					
3	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocu	using) Or	ganisasi.						
3	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocu Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg	using) Or i dalam r	ganisasi. nencapai k	kinerja.					
3 4 5	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refoc. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijak	using) Or i dalam r an dalan	ganisasi, nencapai k n mencapa	kinerja. Il kinerj					
3 4 5 6	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocu Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi epnyesuaian Kebijak Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivita	using) Or i dalam r an dalan s dalam	ganisasi, mencapai k n mencapa mencapai	kinerja. ni kinerj kinerja					
3 4 5 6 7	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinapia telah mempengaruhi penyesuaian (Refocu Pengukuran kinapia telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinapi telah mempengaruhi penyesuaian Kebijak Pengukuran kinapia telah mempengaruhi penyesuaian Aktiyata Pengukuran kinapia telah mempengaruhi penyesuaian Anggar	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam	ganisasi, nencapai k n mencapa mencapai n mencapa	kinerja. ni kinerj kinerja					
3 4 5 6 7 8	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocu Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebilak Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivita Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivita Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Angara Terdapat efisiersia atas pengunanan angaram dalam mencapa	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja	ganisasi, mencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. ni kinerj kinerja					
3 4 5 6 7 8	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocu Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kelipita Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivita Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivita Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggar Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencari dan peduli atas hasil peng	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja ukuran k	ganisasi, mencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. ni kinerj kinerja					
3 4 5 6 7 8 9	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocu Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kelijak Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivita Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuain Anggara Selati pengukuran pengaruhi pengukuran kinerja di pengukuran kiner	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja jukuran k kinerja,	ganisasi, mencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. ni kinerj kinerja ni kinerj					
3 4 5 6 7 8 9 10 3	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocu Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kelpita Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivita Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivita Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Augarat Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Augarat Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Augarat Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran i PELAPORAN KINERJA.	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja jukuran k kinerja.	ganisasi. nencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. ni kinerj kinerja ni kinerj					
3 4 5 6 7 8 9 10 3	struktural maupun fungsional. Pengukuran kineja telah mempengaruhi penyesuaian (Refox- Pengukuran kineja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kineja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Aktivita Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Aktivita Pengukuran kineja telah membengaruh penyesuaian Aktivita Pengukuran kineja telah membengaruh penyesuaian Aktivita Pengukuran kineja telah membana angagaran dalam mencapa Setiap untiksatuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran i PELAPORAN KINERJA Tordapat Dokumen Laporan yang menggambarkan	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja jukuran k kinerja,	ganisasi, mencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. ni kinerj kinerja ni kinerj					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a	struktural maupun fungsional. Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Strateg Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Stelak Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Kebijak Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Aktiyat Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Angara Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapat Setiap untistautan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran i PELAPORAN KINEYIA Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Dokumen Laporan Kineja telah disusun.	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja jukuran k kinerja.	ganisasi. nencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. ni kinerj kinerja ni kinerj					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2	struktural maupun fungsional. Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Strateg Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Strateg Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Aktivita Pengukuran kineja telah membengaruh penyesuaian Aktivita Pengukuran kineja telah membengaruh penyesuaian Aktivita Pengukuran kineja telah membengaruh penyesuaian Aktivita Setiap pengukuran kineja telah membanan anggaran dalam mencap Setiap untiksatuan kerja memahami dan pedul atlas hasia pengukuran i PELAPORAN KINERIA Terdapat Obkumen Laporan yang menggambarkan Dokumen Laporan Kineja telah disusun secara berkala.	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja jukuran k kinerja.	ganisasi. nencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. Il kinerja kinerja Il kinerj					
3 4 5 6 7 8 9 10 3.a 1 2	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocu Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivita Pengukuran kinerja telah disusun pengulan pengu	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja jukuran k kinerja.	ganisasi. nencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. Il kinerja kinerja Il kinerj					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2	struktural maupun fungsional. Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Strateg Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Strateg Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kineja telah membengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kineja telah membengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kineja telah membahan anggaran dalam mencapa Setiap untiksatuan kerja memahami dan pedul attas hasil pengukuran PELAPORAN KINERIA Terdapat Obkumen Laporan yang menggambarkan Dokumen Laporan Kineja telah disusun secara berkala. Dokumen Laporan Kineja telah disusun secara berkala. Dokumen Laporan Kineja telah diformalkan. Dokumen Laporan Kineja telah diformalkan.	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja jukuran k kinerja.	ganisasi. nencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. ni kinerj kinerja ni kinerj					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2 3 4 5	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocu Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivita Pengukuran kinerja telah mempengaruh penyesuaian Aktivita Petarpatan Petarpatan memahami dan peduli atas hasil pengukuran i PELAPORAN KINERJA Petardapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalikan. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalikan. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalikan.	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja jukuran k kinerja.	ganisasi. nencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. ni kinerj kinerja ni kinerj					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2 3 4 5 6	struktural maupun fungsional. Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Strateg Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Strateg Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kineja telah membengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kineja telah membengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kineja telah membengaruh penyesuaian Attivita Setiap pengukuran kineja telah membanan anggaran dalam mencap Setiap untiksatuan kerja memahami dan pedul attas hasil pengukuran PELAPORAN KINERIA Terdapat Obkumen Laporan Kineja telah disusun Dokumen Laporan Kineja telah disusun secara berkala. Dokumen Laporan Kineja telah disusun secara berkala. Dokumen Laporan Kineja telah diformalkan. Dokumen Laporan Kineja telah diforwai. Dokumen Laporan Kineja telah diforwai. Dokumen Laporan Kineja telah dirawi. Dokumen Laporan Kineja telah dirawi. Dokumen Laporan Kineja telah dirawi. Dokumen Laporan Kineja telah disampaikan tepat waktu.	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja jukuran k kinerja.	ganisasi. nencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. ni kinerj kinerja ni kinerj					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2 3 4 5 6	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocu Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivita Pengukuran kinerja telah mempengaruh penyesuaian Aktivita Petarpatan Petarpatan memahami dan peduli atas hasil pengukuran i PELAPORAN KINERJA Petardapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalikan. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalikan. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalikan.	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja ukuran k kinerja. 15,00 3,00	ganisasi, mencapai k n mencapai n mencapai n mencapa n mencapa dinerja.	kinerja. si kinerj kinerja il kinerj 13,3 3					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2 3 4 5 6	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kinerja telah mempengaruh penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruh penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kinerja telah membengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kinerja telah membengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kinerja telah membanan anggaran dalam mencap Setiap untiksatuan kerja memahami dan pedul attas hasip mengukuran PELAPORAN KINERIA Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. Dokumen Laporan Kinerja telah diforwik. Dokumen Laporan Kinerja telah disupulikasikan. Dokumen Laporan Kinerja telah disupulikasikan. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar mengambarkan Kualitas atas Pencapalan Kinerja,	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja jukuran k kinerja.	ganisasi. nencapai k n mencapai mencapai n mencapa	kinerja. si kinerj kinerja il kinerj 13,3 3					
3 4 5 6 7 8 9 10 3.a 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 6 6 7 8 9 6 6 6 6 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	struktural maupun fungsional. Pengukuran kiniqal telah mempengaruhi penyesuaian (Refox Pengukuran kiniqal telah mempengaruhi penyesuaian (Refox Pengukuran kiniqal telah mempengaruhi penyesuaian Striela Pengukuran kiniqal telah mempengaruhi penyesuaian Kebilak Pengukuran kiniqal telah mempengaruhi penyesuaian Akibirah Setalapunturan kiniqal telah mempengaruhi penyesuaian Akibirah Setalapunturan kepilam dan peduli atas hasil pengukuran ingalapunturan kepilam pengukuran kiniqal telah mempendi dan peduli atas hasil pengukuran ingalapunturan pertamparan berupaturan kepilam pengukuran kepilam pengukuran kepilam pengukuran kepilam pengukuran pertamparan berupaturan kepilam pengukuran pertamparan berupaturan kinipaturan kepilam berupaturan kepilam kepilam berupaturan kep	using) Or i dalam r an dalam s an dalam s dalam s dalam si kinerja jukuran k kinerja. 15,00 3,00	ganisasi, mencapai ki n mencapai n mencapai n mencapai n mencapai n mencapai AA	kinerja. ni kinerj kinerja ni kinerj					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2 3 4 5 6 6 3.b	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian (Refox Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian (Refox Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian Strates Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian Kelejak Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian Angiar Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian Angiar Terdapat efisiensi ates pengunan anggaran dalam mencap Setiap pengawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran Neter Jamas Pengukuran Manuman Peter Apprakuran Pererapat Nemera Pererapat Nemera Pererapat Nemera Nemera Pererapat Nemera Nemer	using) Or i dalam r an dalam s dalam s dalam an dalam ai kinerja ukuran k in 15,00 3,00 4,50 dengan s	ganisasi, mencapai ki mencapai n	kinerja. il kinerj kinerjali kinerj il kinerj 3,66					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1	struktural maupun fungsional. Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Strietge Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Kebilak Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Akbirak Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Akbirak Setiap untistatuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran insan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran insan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran insan PELAPORAN KINETAN Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Dokumen Laporan Kineja telah disusun. Dokumen Laporan Kineja telah disampaikan tepat waktu. Dokumen Laporan Kineja telah disampaikan tepat berkuaitas sesusi olokumen Laporan Kineja telah disampaikan kerja serat upaya Dokumen Laporan Kineja telah memenuhi Standar mengambarkan Rualitas sesusi olokumen Laporan Kineja telah disampaikan kineja sertu upaya	using) Ori i dalam ri an dalam s dalam an dalam al kinerja jukuran k kinerja. 15,00 3,00	ganisasi, mencapai k n mencapai n mencapai n mencapai n mencapai n mencapai AA	il kinerja. il kinerja. il kinerja. il kinerja. il kinerja. il kinerja. a,66					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2 3 4 5 6 6 3.a 1 2 2 3 3.b 1 2 3.b 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian (Refox Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian Strateg Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian Strateg Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian Strateg Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian Adapta Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian Adapta Pengukuran kinaja telah mempengaruh penyesusian Adapta Setiap benjakan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran Nerela Pengukuran hama dan peduli atas hasil pengukuran Nerela Pengukuran	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam an dalam an dalam al kinerja jukuran k kinerja 15,00 3,00	ganisasi, inencapai kinencapai kinencapai di mencapai	il kinerja.					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2 3 4 5 6 6 3.a 1 2 2 3 3.b 1 2 3.b 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	struktural maupun fungsional. Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Strietge Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Kebilak Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Akbirak Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Akbirak Setiap untistatuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran insan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran insan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran insan PELAPORAN KINETAN Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Dokumen Laporan Kineja telah disusun. Dokumen Laporan Kineja telah disampaikan tepat waktu. Dokumen Laporan Kineja telah disampaikan tepat berkuaitas sesusi olokumen Laporan Kineja telah disampaikan kerja serat upaya Dokumen Laporan Kineja telah memenuhi Standar mengambarkan Rualitas sesusi olokumen Laporan Kineja telah disampaikan kineja sertu upaya	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam an dalam an dalam al kinerja jukuran k kinerja 15,00 3,00	ganisasi, inencapai kinencapai kinencapai di mencapai	il kinerja.					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2 3 4 5 6	struktural maupun fungsional. Pengukuran kinerja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kinerja telah mempengaruh penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruh penyesuaian Strateg Pengukuran kinerja telah mempengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kinerja telah membengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kinerja telah membengaruh penyesuaian Attivita Pengukuran kinerja telah membanan anggaran dalam mencap Setiap untiksatuan kerja memahami dan pedul attas hasip mengukuran PELAPORAN KINERIA Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. Dokumen Laporan Kinerja telah diforwik. Dokumen Laporan Kinerja telah disupulikasikan. Dokumen Laporan Kinerja telah disupulikasikan. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar mengambarkan Kualitas atas Pencapalan Kinerja,	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam ai kinerja ukuran k kinerja. 15,00 3,00	ganisasi, mencapai k n mencapai n mencapai n mencapa n mencapa dinerja.	kiner il kine il kine il kine					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1	struktural maupun fungsional. Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Strietge Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Kebilak Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Akbirak Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Akbirak Setiap untistatuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran insan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran insan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran insan PELAPORAN KINETAN Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Dokumen Laporan Kineja telah disusun. Dokumen Laporan Kineja telah disampaikan tepat waktu. Dokumen Laporan Kineja telah disampaikan tepat berkuaitas sesusi olokumen Laporan Kineja telah disampaikan kerja serat upaya Dokumen Laporan Kineja telah memenuhi Standar mengambarkan Rualitas sesusi olokumen Laporan Kineja telah disampaikan kineja sertu upaya	using) Ori i dalam ri an dalam s dalam an dalam al kinerja jukuran k kinerja. 15,00 3,00	ganisasi, mencapai k n mencapai n mencapai n mencapai n mencapai n mencapai AA	al kinerja al kinerja kinerja il kiner al 13,3,3					
3 4 5 6 7 8 9 10 3 3.a 1 2 3 4 5 6 6 3.a 1 2 2 3 3.b 1 2 3.b 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	struktural maupun fungsional. Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian (Refox Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Strietge Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Kebilak Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Akbirak Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Akbirak Pengukuran kineja telah mempengaruh penyesuaian Angara Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapat Setiap pengawan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran in PELAPORAN KINETAN Terdapat Dokumen Laporan Kineja telah disusun. Dokumen Laporan Kineja telah disumpaikan tepat waktu. Dokumen Laporan Kineja telah disampaikan tepat waktu. Dokumen Laporan Kineja telah memenuhi Standar mengambarkan Kualitas atas Pencapalan Kineja, intormasi keberasilan kegagalan kineja sertu upaya Dokumen Laporan Kineja telah mengunjaka perbandingan re	using) Or i dalam r an dalam s dalam an dalam an dalam an dalam al kinerja jukuran k kinerja 15,00 3,00	ganisasi, inencapai kinencapai kinencapai di mencapai	il kinerja.					

7 8 0 9 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1	Dokumen Laporan Kinerja telah mengintokan perbandingan retalisak kinerja di oleva hasiosal/lifernasiosala (Benchimark Kino Dokumen Laporan Kinerja telah mengintokan kualitas atas caj wayat dan/atah sambatannya. Dokumen Laporan Kinerja telah mengintokan efisiensi atas pedalam mencapai kinerja telah mengintokan upaya perbaikakinanja kedapan (Rekomendala perbaikan kinerja. Dokumen Laporan Kinerja telah mengintokan upaya perbaikakinaja kedapan (Rekomendala perbaikan kinerja). Pelaporan Kinerja telah memberikan danpak yang besar dalam penyesualan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Informasi dalam laporan kinerja selah menjadi perhaitan utam Penyajian informasi dalam laporan kinerja selah menjadi kepedulam Informasi dalam laporan kinerja selah menjadi kepedulam Informasi dalam laporan kinerja menjadi kelah dijunjakan telah dijunjakan telah dijunjakan telah dijunjakan dalam minormasi dalam laporan kinerja menjadi kelah dijunjakan telah dijunjakan telah dijunjakan telah dijunjakan dalam minormasi dalam laporan kinerja menjadi kelah dijunjakan telah dijunjakan telah dijunjakan dalam minormasi dalam pagaran kinerja menjadi kelah dijunjakan telah dijunjakan telah dijunjakan telah dijunjakan telah dijunjakan telah dijunjakan dalam minorma dalam pagara kinerja menjadi perbanjakan dalam minorma dalam perbanjakan dalam minorma dalam perbanjakan dalam minorma dalam perbanjakan dalam d	erja). paian kin enggunaa	erja besert in sumber o	a upaya daya
9 1 3.c 1 1 1 2 1 3 3 1 4 1 4 1	nyata dan/atau hambatannya. Dokumen Laporan Kineja telah menginfokan ofisiensi atas pedalam mencapai kineja. Dokumen Lapora Kineja telah menginfokan upaya perbaikai kineja ke depan (Rekomendasi perbaikan kineja). Pelaporan Kineja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesualan strategi/kebljakan dalam mencapai kineja berikutura dalam penyesualan strategi/kebljakan dalam mencapai kineja berikutura dalam perora kineja sefalu menjadi perbaitan utam Penyajan informasi dalam laporan kineja sefalu menjadi perbaitan utam Penyajan informasi dalam laporan kineja sefalu menjadi perbaitan utam	enggunaa n dan per	ın sumber o	daya
9 1 1 1 2 1 3 1 4 1	dalam mencapai kinerja. Dokumen Lapora Kinerja telah menginfokan upaya perbaikai kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesualan strategli/kebljakan dalam mencapai kinerja berikutura kinerja berikutura dalam perora kinerja berikutura dalam laporan kinerja selah unenjadi perbaitan utan Penyajan informasi dalam laporan kinerja selah unenjadi perbaitan utan Penyajan informasi dalam laporan kinerja menjadi kinerja menja	n dan per		
1 2 3 4	kinarja ka depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesualan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utam Permajajan informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian		nyempurna	an
1 1 2 1 3 1 4 1	dalam penyesualan strategi/kebljakan dalam mencapai kinerja berikutnya Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utam Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian	7,50		
3 1	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian		A	6,75
3 1				ggung
41	untuk mencapai kinerja.			itas
	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalan anggaran untuk mencapai kinerja.	n penyes	uaian peng	gunaan
61	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evalua Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyes yang akan dihadapi berikutnya.			
71	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubah	nan buda	ya kinerja	
	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	Service Services	22,5
l.a l	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah	5,00	A	4,5
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern	nal.		
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada			
3 8	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan seca	ara berjei	njang.	
0	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya	7,50	А	6,75
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesu			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh	SDM ya	ng memad	ai.
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan den			ng
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada			
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan men	iggunaka	n Teknolog	ji
1	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan	12,50	А	11,25
	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja ir	nternal te	lah ditindal	klaniuti.
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaks rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.			
	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatka peningkatan akuntabilitas kinerja.	n untuk p	erbaikan d	lan
	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfa afektifitas dan efisiensi kinerja.	atkan da	lam mendu	kung
	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan mema akuntablitas kinerja internal.	anfaatkar	n hasil eval	uasi
			Nilai	90,45

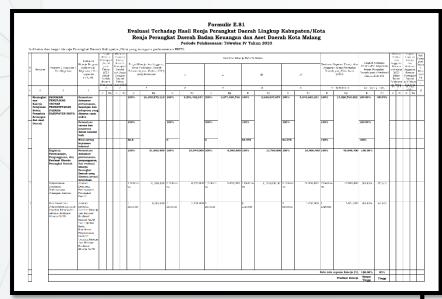


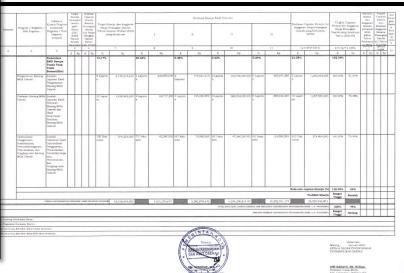






Laporan Evaluasi dan Monitoring Realisasi Kinerja













Register Resiko BKAD



PEMERINTAH KOTA MALANG INSPEKTORAT DAERAH

BERITA ACARA
HASIL PENDAMPINGAN PENYUSUNAN *RISK REGISTER*PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KOTA MALANG

ANTARA TIM INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

--Pada hari ini Jumat, tanggal 13 bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kantor BKAD Kota 701/2.02/35.73.300/2023, tanggal dengan Kepala BKAD dengan hasil pembahasan sebagai berikut : Tim Audit Inspektorat telah mendampingi Pejabat di Lingkungan BKAD Kota Malang dan telah membahas Risk Register tanggal 13 bulan Januari tahun 2023 sebagaimana pada lampiran dan memberikan penjelasan seperlunya kepada jajaran Pejabat Struktural dan Staf atas materi permasalahan

Terhadap materi dan hasil yang telah disampaikan dan didampingi oleh Tim Pendamping Inspektorat beserta dokumen data pendukung yang merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Kepala BKAD Kota Malang menyatakan sepakat terhadap seluruh materi temuan sebagaimana tertuang dalam lampiran

Terhadap dokumen Risk Register sebagaimana terlampir, BKAD akan mendokumentasikan untuk

Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Pendampingan dibuat dengan sebenarnya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Audit Inspektorat dan Kepala BKAD Kota Malang pada hari Jumat tanggal 13 bulan Januari Tahun 2023 serta tempat sebagaimana tersebut diatas.











Nama Pemda	: Pernarintah Kota Metang, Provinsi Jawa Timur						
Tahun Penikian Periode vena diniki	: 2023 Periode RP-MD Tahun 2016 - 2023						
Urusan Pemerintahan	: Pensos re-usito Tarun 2016 - 2023 : Unusun Penuniang Bidang Keutingan						
OPD yang Diniki	: Baden Keuengen dan Aset Deoreh						
Sumber Data	: Renstra, Renja, DPA						
Tujuan Strategis	: Tercapainya Optimalisasi Pengetolaan Keuengan Daerah Yang Transparan dan A	Uxintabe					
	Program Penunjang Urusen Pomorintahan Daerah Kota Malang Kegislan: a. Perencenaan, Penganggaran, dan Eveluesi Kinerja Penangkat Daerah						
	Administrati Keuangan Pesangkat Daerah Administrati Barrang MTk Daerah pada SKPD Administrati Kepagawalan Perangkat Daerah						
	e. Administrasi Umum Peranckat Daerah						
	Pergadaan Brassa Mki Calanth Pensising Usiasa Pensishah Dasash Penyadaan Jasa Pensishan Usiasa Pensishan Dasash Pendithasan Brassa Mki Casash Pensishan Usiasa Pensishah Dasash Pengara Pengalalaan Keuangan Dasash						
Program BKAD (Renja 2023) dan Kegiatan Utama							
con request Coma	Kegistan: a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran						
	b. Koerdnasi dan Pencelolaan Perbendaharaan Operah						
	c. Koordinesi dan Pataksanaan Akuntanai dan Pataporan Keuangan Daerah d. Penunjang Urusan Kewanangan Pengelalan Keuangan Daerah						
	a Penpitalisan Data dan Implementsal Statum Informasi Pemerintah Daeral	h Lingka					
	Kouangan Daerah 3. Program Pengelotean Bareng Milk Daerah						
	3. Program Pengelosain Bishang Milk Daeran Kodatan:						
	a. Pengeloisan Barang M3k Daerah						
	- Nisi survey hapussan internal						
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja.	1001					
	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu						
	1.c Persentase barang milk daerah yang terinventerisir	1009					
	1.d Personitres pegawai yang terfesilitesi layanan kapagawaian						
	1.e Persontase kebuluhan kantar yang terlasi/tasi	1009					
Kekuaran/Hasil Kegiatan	1.f Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	1009					
	1.g Persontase suret dinas yang dilindaklanjuti	1009					
	1.h Persentase berang milk daerah yang terpelihara	1009					
	2.8 Porsontase kesosualan dakumen penganggaran dangan dakuman perencanaan						
	2 b Persentase kesesualan proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketantuan yang berlaku						
	2 b yang berlaku						
	2.c Persentase terpenuhinya dana darurat dan mendesak	1009					
	2 b yang berlaku	-					
	2-5 jung berlatu 2-6 Persentase terpenuhinya dana darunat dan mendesiak 2-6 Persentase terpenuhinya dana darun terjementesi Sistem Informasi 2-6 Persentase ketansedian data datam terjementesi Sistem Informasi 2-6 Persentase UK SKPD Yang sessai Standar Akuntansi Persentahan (SAP)	1009					
	2.0 yang berlaksi 2.0 Parsentase torpenuhinya dana darurat dan mendesak 2.d Persentase ketersedisan data dalam Inglementasi Sistem Informasi Pementahan Dassah	1009					
	Among beriete John Periete John Per	1009					
	2.6 Persontase terpenshinya dana darunat dan mendesak 2.6 Persontase terpenshinya dana darunat dan mendesak 2.6 Persontase ketendedian data dalam legtementasi Satom telenmusi 2.6 Persontase LM SKPD Yang sosual Standar Alluntaria Persontathan (SAF) Persontase LM SKPD Yang sosual Standar Alluntaria Persontathan (SAF) Persontase herecusian Data Rincian Total SMD Dennia Arthra Tetan Person	1009					
	I mang barieta La Premotate bergin prima hiya dana danarat dan mandesak La Premotate bergin prima hiya dana danarat dan mandesak La Premotate bergin prima hiya danarat dan mandesak La Premotate bergin prima hiya danarat dan mandesak bir danarat bergin prima hiya danarat bir dan	1009					
	I mang barieta La Premotate bergin prima hiya dana danarat dan mandesak La Premotate bergin prima hiya dana danarat dan mandesak La Premotate bergin prima hiya danarat dan mandesak La Premotate bergin prima hiya danarat dan mandesak bir danarat bergin prima hiya danarat bir dan	1009					

Nama Pemda	Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur				
Tahun Penilaian	: 2023				
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang Bidang Keuangan				
OPD yang Dinilai	: Beden Kouengen den Aset Deersh				
Sumber Deta	: Renstra, Renja, DPA	177-117-117-117			
Tujuan Strategis	: Tercepainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Transparan dan			
Sasaran Strategis	: Meningketnya Kinerja Pelayanan Bedan Keuangan dan Aset Deerah : Meningketnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
IKU Renstra OPD	IKU	202			
	1 Nilai SAKIP	85			
	Persentase laporan keuangan SKPD bebas salah saji maler mendukung BPK	ial 1009			
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Malar	9			
	Program Pengelolsan Keuangan Daerah				
	3. Program Pengelolaan Barang Milk Daerah				

lam ahu eric uju	na OPD un Penilaian iode yang dinilai san Strategis	: Badan Keuangan d : 2023 : Periode RPJMD Ta	shun 2018 - 2023 alisasi Pengelolaan Keuang		fang Transpara	an dan Akuntabel				
			Minaria Risiko			Sebab			Dampak	
No	Tujuan/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja Renstra OPD	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	CIUC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	0	f	g	h	1		k
1	Tujuan: Tercapsinya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuratabel Sasaran: Menigkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Penyusunan R-APBO tidak tepat waktu	RSO.23.37 .29.1	KEPALA BADAN	SOM Tridak kerepeter den fisik cutep-eccere kusertilles Aphillas SIPD i India kerepeter den fisik cutep-eccere kusertilles Seisex perodukting jertingtin kurang optimal Seisex perodukting jertingtin kurang optimal Seisex perodukting jertingtin kurang optimal Tertambatinya persebagian KUAPPAS	Eksternal / Internal	UCIC	Penyampaian R-APBD tidak tepat waktu	Pemerintah Daerah Masyarakat
			Penetapan APBD tidak tepat waktu	RSO 23.37 29.2	KEPALA BADAN	Keterlambatan penyampaian R-APBD Ketidaktepatan waktu pembahasan sesuai jadwal yang dietapkan/disepakati, kelika membahasi dengan DPRD Adanya perbedaan persepi dalam penentuan APBD antara Legislatif dan Eksekstif	Eksternal / Internal	UCIC	Penetapan Perda APBD tidak tepat waktu	Pemerintah Daerah Perangkat Daerah
			Target Persentase Penyerapan Belanja Daerah tidak maksimal	RSO.23.37 .29.3	BADAN	Keterlambatan Perangkat Daerah dalam mengajukan pencairan anggaran (SPM) Aplikasi SIPD sering error/ lambat SDM Tidak kompeten (pergantian personel keuangan) Sarana pendukung jaringan kurang optimal	/ Internal		Kinerja penyerapan anggaran tidak tecapai/rendah	Perangkat Daerah Masyarakat
			Pencairan melewati Tahun Anggaran Berjalan	.29.4	BADAN	Kelalaian petugas dalam pennrosesan SP2D Kelalaian pitak bank Belum terintegrasinya SIPD dengan aplikasi bank	/ Internal		Keterlambatan pembayaran kepada Pihak yg berhak menerima pembayaran	Perangkat Daerah Pihak Ketiga
			Penyusunan Regulasi dan Kebijakan di Bidang Anggaran yang belum sinkron dengan regulasi di atasnya	RSO 23.37 29.5	KEPALA BADAN	Perbedaan interpretosi dalam Penyusunan Regulasi dan Kebijakan di Bidang Anggaran	Internal	С	Pemborosan dan Temuan pemeriksa eksternal	Perterintah Daerah Perangkat Daerah

			Risiko			Sebab			Dampak	
No	Tujuan/Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja Renstra OPD	Uralan	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	CIUC	Uraian	Pihak yang Terkena
а	b	c	d	0	1	q	h	1		k
			Pemindahtanganan tahah dan bangunan tidak melalui Keputusan Kapala Daerah dan persetujuan OPRO	RSO 23.37 .29.21	KEPALA BADAN	Tidak Ada konsolidasi dan sinkronisasi data Tanah, Gedung dan Bangunan yang disitukan kurang optimal.	internal/e ksternal		Kerugian Daerah	Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
			Persindahtanganan BMD untuk penyertaan modal tanpa disertai Perda tantang Penyertaan Modal	RSO 23.37 .29.22	KEPALA BADAN	Tidak Ada rekomalasi pencetatan antara perusehaan daerah dan BKAD Tidak Ada berta acara serah terima asat tetap Tidak Ada usulan penetapan Penda tentang Penyortaan Medal dari Kepela Derah kepada DPR	internal	C/UC	Kerugian Doorah	Pemerintah Daerah
			Pemantauan dan investigasi ataa pelaksanaan penggunaan, pemantastan, dan pemindahanganan BMD tidak optimal	R90.23.37 .29.23	KEPALA BADAN	Date listik skurril (dobel date, date flidik ternodia Aset Mangeminishusiah 8FM) menh tercatat dalam IP dan dalam BMD	internal		Derngumen, pemanlisaten, dan pemanlisaten, dan pemindahtanganan BMD Sdak tertib (tidak sesuai tungsi, terjada tunggakan, turtutan hakum, penggunann tarpa jinlegalitas) 2. BMD beralih penguasasan ke pihak kina.	Personetah Daerah
T			Nilai SAKIB Kurang dari 85	RSO.23.37 .29.24	KEPALA BADAN	Tidak tercapainya target kinerja bidang dan sekretariat Kurangnya data dukung pada beberapa komponen sakip	Internal	С	Reputasi/citra Organisasi turun	Pemerintah Daerah









TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2023















DOKUMENTASI KEGIATAN











FGD Penganggaran kembali Tahun 2022 Narasumber dari Kemendagri Tanggal 11 Januari 2023









Berakhlak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangga
melayani
harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangga
melayani

Peningkatan Kapasitas SDA PPKeu SKPD, Bendahara di Lingkungan Pemkot Malang Tanggal 11 – 12 Januari 2023





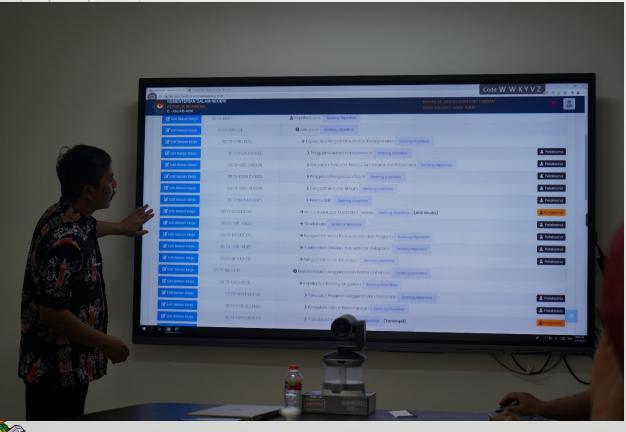
Pendampingan Pemetaan/Identifikasi Resiko dalam rangka pelaksanaan SPIP Tanggal 13 januari 2023















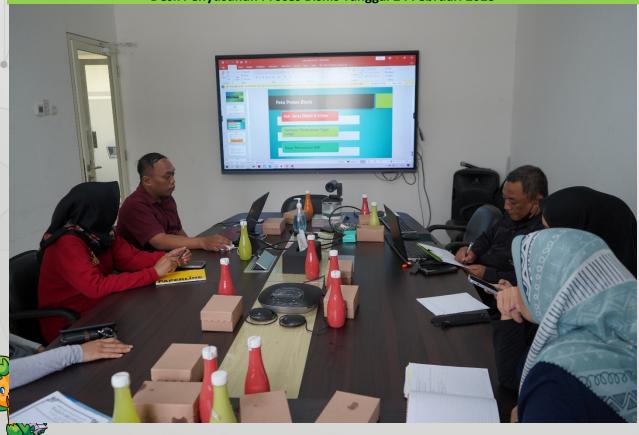




Rapat Koordinasi Penyusunan APBD Tahun 2023 Tanggal 16 Februari 2023



Desk Penyusunan Proses Bisnis Tanggal 24 Februari 2023







Pengawasan dan Pengendalian BMD dalam rangka Optimalisasi Peningkatan PAD
Tanggal 1-2 Maret 2023













Berakhlak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratifa bangga
melayani
bangsa

Tahun 2023

Sosialisasi Penggunaan Fasilitas Kantor (BMD) Bagi ASN dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tanggal 21 Maret 2023







BerAKHLAK Laporán Kinerja Instansi Pemerintah

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif Laporán Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2023
Tahun 2023









Berakhlak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangga
melayani
bangsa

Tahun 2023





Rapat Pembahasan Rekonsiliasi Anggaran Tanggal 12 Juni 2023







Rapat Pembasahan Jawaban Pandangan Umum Fraksi DPRD dengan Tim TAPD Tanggal 4-5 Juli 2023

























Berakhlak Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif bangga
melayani
bangsa

Tahun 2023























Forum Group Discussion (FGD) tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pejabat Kepala Daerah dan Koordinasi dan Konsultasi Penerapan aplikasi e-BMD Tanggal 29-31 Oktober 2023























Koordinasi dan Konsultasi Penerapan Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tanggal 22-24 November 2023









Harmonisasi dan Sinkronisasi Tindaklanjut Penyelesaian LHP BPK RI Perwakilan Jawa Timur Tanggal 6-7 Desember 2023











